

MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI

ZULAECHA NGIU



IP.011.02.2019

MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI

ZULAECHA NGIU

Pertama kali diterbitkan pada Februari 2019
Oleh **Ideas Publishing**

Alamat: Jalan Ir. Joesoef Dalie No. 110 Kota Gorontalo
Surel: infoideaspublishing@gmail.com
Anggota IKAPI, No. 0001/ikapi/gtlo/II/17

ISBN: 978-602-5878-75-6

Penyunting: Nur Fitri Yanuar Misilu
Penata Letak: Siti Rahmatia Ntou
Sampul: Sintia R. Usman

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
PRAKATA	vii

BAB 1 ESENSI PERGURUAN TINGGI

- A. Perguruan Tinggi sebagai Tonggak Pembangunan Bangsa1
- B. Manajemen Perguruan Tinggi2

BAB 2 PENJAMINAN MUTU

DI PERGURUAN TINGGI

- A. Konsep Penjaminan Mutu Akademik.....5
- B. Standarisasi dan *Output* Mutu Perguruan Tinggi14
- C. Tolak Ukur Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi.....15
- D. Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi.....17
- E. Urgensi Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi.....20
- F. Badan Penjamin Mutu Sebagai Penegak Citra Perguruan Tinggi.....21

BAB 3 EVALUASI PENJAMINAN MUTU

DI PERGURUAN TINGGI

- A. Pentingnya Evaluasi Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi.....25
- B. Deskripsi Konseptual Evaluasi Kebijakan26

C. Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Penjaminan Mutu	38
D. Model-Model Evaluasi Kebijakan.....	39

BAB 4 PELAKSANAAN EVALUASI KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU

A. Polemik Kebijakan Penjaminan Mutu Akademik di Perguruan Tinggi	51
B. Evaluasi Kebijakan Penjaminan Mutu Akademik di Perguruan Tinggi	53
C. Kriteria Evaluasi Kebijakan Penjaminan Mutu Akademik.....	55
D. Standar Akademik Perguruan Tinggi	57
E. Model Evaluasi yang Diterapkan	58
F. Tahapan Evaluasi Kebijakan Penjaminan Mutu	59

BAB 5 STUDI KASUS EVALUASI KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI

A. Komparasi Hasil Evaluasi Konteks dengan Kebijakan Penjaminan Mutu Akademik.....	70
B. Komparasi Hasil Evaluasi Masukan dengan Kebijakan Penjaminan Mutu Akademik.....	89
C. Komparasi Hasil Evaluasi Proses dengan Kebijakan Penjaminan Mutu Akademik.....	112
D. Komparasi Hasil Evaluasi Produk dengan Kebijakan Penjaminan Mutu Akademik.....	130

DAFTAR PUSTAKA141



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Kriteria Evaluasi Kebijakan Penjaminan Mutu Akademik.....	55
Tabel 4.2	Komponen Konteks Penjaminan Mutu	60
Tabel 4.3	Komponen Input.....	61
Tabel 4.4	Komponen Proses Penjaminan Mutu	64
Tabel 4.5	Komponen Produk Penjaminan Mutu	66
Tabel 5.1	Luas Bangunan Masing-Masing Fakultas	95
Tabel 5.2	Luas Bangunan Fasilitas Penunjang.....	96
Tabel 5.3	Rata-rata IPK Mahasiswa S1 dan S2 UNG	132



DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Perkembangan Jumlah Dosen UNG Tahun 2006-2010.....	92
Gambar 5.2	Perkembangan Jumlah Pegawai UNG Tahun 2006-2010	93
Gambar 5.3	Perkembangan Jumlah Mahasiswa Terdaftar di UNG Tahun 2006-2010.....	102
Gambar 5.4	Jumlah Penelitian yang dilakukan Dosen UNG	136
Gambar 5.5	Jumlah Pengabdian Masyarakat yang dilakukan Dosen UNG	137



PRAKATA

Segala puji hanya milik Allah, *Rabb* semesta alam. Tak ada yang patut untuk diberikan pujian selain kepada-Nya yang telah membuat penulis bisa menyelesaikan buku ini dan dapat dinikmati pembaca sebagai suatu bacaan penting, terlebih di kalangan akademik.

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memegang peran penting dalam pembangunan bangsa. Perguruan tinggi telah melahirkan kaum terdidik dan intelektual yang menata kehidupan bangsa menuju arah yang lebih baik. Mutu (kualitas) perguruan tinggi sangat ditentukan oleh manajemen perguruan tinggi. Prasarana dan sarana fisik serta sumber daya manusia yang dimiliki, tidak akan berdaya guna bila tidak dikelola melalui manajemen perguruan tinggi yang baik. Maka dari itu, evaluasi terhadap penjaminan mutu perguruan tinggi sangat diperlukan.

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah penjaminan mutu seperti apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa di zaman sekarang? Selain itu, apakah lingkungan kampus layak/menunjang dilaksanakannya kebijakan penjaminan mutu? Selain itu, perlu juga diketahui kekuatan dan kelemahan pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu. Kemudian, hal apa yang melatarbelakangi sehingga ada kelemahan dan menggunakan kekuatan apa untuk mengimplemetasikannya.

Oleh karena alasan tersebut di atas, evaluasi manajemen perguruan tinggi berusaha dihadirkan penulis di dalam buku ini. Evaluasi dilakukan terhadap apa yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan, serta apa yang menjadi kendala sehingga kebijakan-kebijakan yang ada di perguruan tinggi tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Model evaluasi yang digunakan adalah model CIPP.

Dengan adanya buku ini diharapkan manajemen perguruan tinggi akan diterapkan dengan baik sehingga akan menghasilkan *output* yang berkualitas. Selain itu dapat menambah wawasan kepada pembaca. Sehingga buku ini dapat memberikan manfaat lebih ke depannya.

Tidak ada buku yang sempurna. Ketidaksempurnaan karena penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, perbaikan demi perbaikan diperlukan untuk kesempurnaan buku ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih mendalam kepada pihak-pihak yang telah turut serta berperan serta dalam penulisan buku ini dari awal hingga akhir. Terutama kepada Ideas Publishing sebagai penerbit buku ini. Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* meridhoi segala usaha kita. Aamiin.

Gorontalo, Februari 2019

Penulis

ESENSI PERGURUAN TINGGI



1

A. Perguruan Tinggi sebagai Tonggak Pembangunan Bangsa

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memegang peran penting dalam pembangunan bangsa. Perguruan tinggi telah melahirkan kaum terdidik dan intelektual yang menata kehidupan bangsa menuju arah yang lebih baik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perguruan tinggi memiliki tiga kewajiban sebagai misi utamanya yang dikenal dengan tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi ini meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dalam mengemban

Manajemen Perguruan Tinggi

tridarmanya memerlukan penataan secara menyeluruh terhadap manajemen kelembagaan dan manajemen pengelolaan.

B. Manajemen Perguruan Tinggi

Mutu (kualitas) perguruan tinggi sangat ditentukan oleh manajemen perguruan tinggi.¹ Manajemen perguruan tinggi adalah kemampuan mengelola perguruan tinggi secara integral dan menyeluruh dengan mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perguruan tinggi. Prasarana dan sarana fisik serta sumber daya manusia yang dimiliki, tidak akan berdaya guna bila tidak dikelola melalui manajemen perguruan tinggi yang baik. Optimalisasi sumber daya pada perguruan tinggi memerlukan keahlian (*skill*). Keahlian inilah yang secara sederhana menjadi unsur utama pada manajemen perguruan tinggi.

Penerapan manajemen perguruan tinggi yang baik, akan menghasilkan *output* yang berkualitas. Sedangkan sebaliknya, manajemen yang tidak baik akan

¹ Kalobs di dalam Syahrizal Abas. *Manajemen Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 11.

menghasilkan *output* yang tidak berkualitas. Manajemen yang diterapkan pada perguruan tinggi adalah manajemen yang mengacu pada perwujudan tridharma perguruan tinggi. Manajemen perguruan tinggi pada dasarnya tidak berbeda dengan manajemen pada umumnya yang diterapkan pada suatu organisasi. Perbedaannya terletak pada posisi perguruan tinggi yang mengelola pengetahuan sebagai aset organisasi. Perencanaan, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, evaluasi, dan pengawasan dalam manajemen perguruan tinggi, seluruhnya mengacu pada tujuan peningkatan kualitas akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan.



Zulaecha Ngiu

PENJAMINAN MUTU DI PERGURUAN TINGGI

2

A. Konsep Penjaminan Mutu Akademik

Dalam bagian ini terlebih dahulu akan diuraikan tentang penjaminan mutu kemudian dilanjutkan dengan penjelasan penjaminan mutu akademik.

1. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu atau *quality assurance* secara umum adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Merujuk hal ini ada dua prinsip penjaminan mutu yaitu: 1) *fit for purpose*, ini berarti produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 2) *Right first time*, ini berarti

kesalahan harus dapat dieliminasi atau sudah tepat sejak awal.² Dalam teori ini jika dihubungkan dengan pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di perguruan tinggi berarti produk yang dihasilkan yaitu mutu mahasiswa benar-benar sesuai dengan keinginan dari *stakeholder*. Hal ini karena mereka memiliki kapabilitas dan profesional sehingga si pemakai jasa atau *stakeholder* merasa puas dengan hasil atau *output* ini. Jika seandainya setelah dievaluasi ada kesalahan terhadap pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu ini, maka harus dicari solusi untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Penciptaan manusia bermutu diyakini dapat dilakukan melalui berbagai proses dalam sistem pendidikan tinggi. Pemikiran yang ada dalam benak masyarakat ini bahwa pendidikan tinggi diibaratkan sebagai penghasil manusia bermutu, karena manusia akan lebih bermutu apabila ia dididik dengan baik. Universitas sebagai pendidikan tinggi harus mampu menciptakan manusia bermutu. Oleh karena itu,

² Sallis, Edward, *Total Quality Management* (London: Phyladelphy, 1993), h.23

pengurutan tinggi dituntut harus dapat mengimplementasikan sistem penjaminan mutu. Ada beberapa syarat agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik antara lain: 1) adanya pendefinisian mutu, 2) adanya pendefinisian mutu dalam pendidikan tinggi, 3) adanya pengklasifikasian dimensi mutu dalam pendidikan tinggi, 4) adanya pengklasifikasian elemen, komponen, unsur penjaminan mutu pendidikan tinggi, dan 5) adanya penempatan komponen sistem penjaminan mutu.

Menurut Vroeijenstijn, mutu dalam pendidikan tinggi merupakan konsep yang multi dimensi. Dalam artian, konsep ini bisa memenuhi berbagai macam harapan dari *stakeholders* seperti pemerintah, pemberi kerja, masyarakat luas, masyarakat akademis, dan mahasiswa. Baik tidaknya mutu merupakan hasil penilaian terhadap proses dan *output*. Para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) pasti memiliki *concern* terhadap *assessment* tersebut baik pada proses ataupun pada hasil *assessment*. Khususnya jika *assessment* tersebut tidak sesuai

dengan yang diharapkan.³ Apabila kondisi tersebut tercapai dan disadari, maka *stakeholders* merasa perlu melakukan audit untuk memperbaiki *assessment* tersebut. Jika *assessment* dilakukan oleh suatu badan otonom yang bersifat eksternal, maka hasil tersebut dinyatakan dalam bentuk pengakuan (akreditasi). Sebaliknya jika *assessment* dilakukan secara internal, maka hasilnya dinyatakan dalam bentuk evaluasi program studi berbasis evaluasi diri (ESBED).

a. Unsur Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu terdiri dari berbagai proses. Titik awalnya adalah pendefinisian mutu yaitu sesuatu yang paling bernilai dan penting dalam pendidikan. Tidak lain ini merupakan tujuan yang harus dicapai. Penjaminan mutu dalam pelaksanaannya selalu menghubungkan tujuan pendidikan dengan hasil yang sesuai. Hal ini tentu berimplikasi pada pengembangan pembelajaran. Adapun

³ Ton Vroeijenstijn, "How Do We Know That We Are Good? (and how do others know it): The need for internal Quality Assurance, *Workshop*, ASAN-EU University Network Programme, Indonesia, 2005.

unsur-unsur utama dalam penjaminan mutu antara lain sebagai berikut.

- 1) Pembandingan *how things are* dan *how things should be*. Hal ini merupakan proses evaluasi diri sepanjang waktu dan cara merefleksikan praktek,
- 2) Melakukan pengukuran guna menutup kesenjangan antara aspirasi dan praktek dengan referensi pada prioritas kunci dan tujuan yang disepakati dan kemudian proses pengembangan perencanaan.

b. Tujuan Penjaminan Mutu

Adapun tujuan dari penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Hal ini dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.⁴

⁴ Dirjen Dikti, *Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, 2003.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara internal oleh perguruan tinggi, akan dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi. Akreditasi ini akan dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, objektivitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di perguruan tinggi dapat diwujudkan.

c. Tahapan Proses Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi dijalankan melalui tahap-tahap dalam suatu proses sebagai berikut.

- 1) Perguruan tinggi menetapkan visi dan misi,
- 2) Berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi tersebut, setiap program studi menetapkan visi dan misi,
- 3) Visi setiap program studi kemudian dijabarkan oleh program studi terkait

menjadi serangkaian standar mutu pada setiap butir mutu,

- 4) Standar mutu dirumuskan dan ditetapkan dengan meramu visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif). Sebagai standar, rumusannya harus spesifik dan terukur yaitu mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*),
- 5) Perguruan tinggi menetapkan organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu,
- 6) Perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu dengan menerapkan manajemen kendali mutu,
- 7) Perguruan tinggi mengevaluasi dan merevisi standar mutu melalui *benchmarking* secara berkelanjutan.

2. Penjaminan Mutu Akademik

Penjaminan mutu akademik adalah proses dimana *customers, stakeholders, clients*, atau pihak-pihak berkepentingan lain merasa terpuaskan bahwa standar mutu akademik dicapai secara konsisten,

(<http://www.uleth.ca/quqlity/policy-definitioncfm>).

Untuk memberikan jaminan seperti itu, perlu dibangun sebuah sistem Manajemen Mutu Akademik. Bagian dari sistem ini adalah Pengawasan Mutu Akademik yaitu kesesuaian kinerja dengan standar diperiksa dan tindakan-tindakan akan diambil jika kesesuaian tidak tercapai.

Sistem Manajemen Mutu Akademik dapat diperiksa untuk melihat apakah sistem itu ada dan berjalan. Pekerjaan ini disebut Audit Mutu Akademik. Produk atau pelayanan akademik dapat diperiksa secara eksternal untuk melihat apakah produk dan pelayanan itu sudah tercapai. Pekerjaan ini disebut Asesmen Mutu Akademik. Agar semua ini dapat berjalan dengan mulus di dalam organisasi, perlu dibangun suatu lingkungan/atmosfir akademik. Di dalam lingkungan ini semua pihak dari atas sampai ke bawah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap Budaya Mutu Akademik yang sudah disepakati bersama. Dalam menjalankan tugasnya, BPMA telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan

penjaminan mutu akademik, seumpama lokakarya, pelatihan, dan seminar di dalam dan di luar negeri.

Sistem penjaminan mutu akademik dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi. Dengan demikian, universitas juga menjamin mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan di dalam spesifikasi program studi.

Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa penjamin mutu akademik adalah kumpulan proses evaluasi yang sistematis untuk memantau dan meninjau kinerja, mengidentifikasi kualitas hasil, dan merekomendasikan perbaikan unit akademik dan program dari sebuah universitas.

B. Standarisasi dan *Output* Mutu Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi tentu sangat menyadari bahwa mutu diri sebagai lembaga pendidikan berikut prestasi akademik yang dimiliki menjadi tumpuan dan pilar utama untuk turut menjadi bagian dari dinamika kompetisi di era global. Mutu diri di bidang keilmuan, penelitian, publikasi ilmiah, sumber daya manusia, tata kelola organisasi, kelengkapan sumber-sumber informasi akademik dan lain-lain menjadi suatu keharusan bagi perguruan tinggi. Mutu diri yang dimaksud di sini bukanlah mutu yang sekadar diklaim oleh perguruan tinggi itu sendiri. Melainkan mutu yang diukur menggunakan standar tertentu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga akreditasi, baik nasional maupun regional dan internasional. Dengan demikian, akan terjadi standarisasi mutu perguruan tinggi.

Bagi perguruan tinggi di Indonesia, untuk mengejar kemajuan serta menempatkan diri sejajar dengan perguruan-perguruan tinggi kelas dunia

yang ada di negara-negara maju diperlukan usaha yang besar, sungguh-sungguh, konsisten, dan berkelanjutan. Hal ini tentu saja mutlak dibutuhkan untuk itu. Tata kelola organisasi yang diorientasikan untuk mendukung terciptanya perguruan tinggi bermutu dan kompetitif menjadi prasyarat penting yang harus ada.

Mutu perguruan tinggi yang mendapat penjaminan, sesuai indikator-indikator yang ditentukan oleh lembaga penjamin mutu internasional dan akreditasi lintas batas negara, tidak saja memberikan harapan akan kehadiran manusia-manusia unggul untuk mengelola berbagai bidang kehidupan. Melainkan juga untuk mempertinggi mutu peradaban masyarakat, kualitas kehidupan berbudaya, dan kehormatan harkat martabat manusia.

C. Tolak Ukur Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi

Akuntabilitas publik dan penjamin mutu perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kondisi internal dan tata kelola organisasi setiap perguruan

tinggi. Selain itu, juga turut dibentuk oleh interaksinya dengan masyarakat di luar perguruan tinggi. Bagaimanapun, kecemerlangan akademik dan kehebatan teori-teori yang ditawarkan perguruan tinggi sebagai temuan dan karya intelektual para ilmuwan di dalamnya pada dasarnya merupakan refleksi dari fenomena kehidupan masyarakat dan lingkungan alam di luar kampus perguruan tinggi.

Sementara itu, kevaliditasan, inovasi dan penciptaan, serta pengembangan teori ilmu pengetahuan oleh para ilmuwan di suatu perguruan tinggi sesungguhnya tidak lepas dari hasil kerja dan temuan-temuan para ilmuwan di perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun di negeri-negeri lain. Untuk itulah, hubungan dan kerja sama dalam berbagai bidang keilmuan antara satu perguruan tinggi dalam suatu negara serta perguruan tinggi antar negara menjadi penting. Sebuah hubungan dan kerja sama menjadi produktif dan memberikan dampak signifikan jika diletakkan dalam kesesuaian misi dan kerangka yang setara. Kesesuaian misi dalam pengertian upaya terus menerus adalah untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Sedangkan setara, terutama dalam soal perbaikan penjaminan mutu dan akreditasi.

Sebagai lembaga publik, perguruan tinggi harus terbuka dan bebas untuk dikontrol. Ia tidak steril terhadap tuntutan, dinamika dan kontrol masyarakat. Karena itu, akuntabilitas dan penjaminan mutu perguruan tinggi turut ditentukan oleh sejauh mana kontrol yang diberikan masyarakat dan lembaga penjamin mutu. Masyarakat dalam konteks ini, diletakkan sebagai sumber rekrutmen mahasiswa, sumber bantuan dana, dan sekaligus pengguna lulusan harus diberi ruang untuk menilai mutu dan peran perguruan tinggi. Dalam hal mengontrol dan menilai mutu perguruan tinggi, kalangan masyarakat salah satunya dapat direpresentasikan oleh keberadaan lembaga penjamin mutu dan akreditasi yang bekerja secara profesional dan independen untuk kemudian hasilnya diumumkan kepada masyarakat luas.

D. Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi merupakan salah satu lembaga penyedia jasa layanan masyarakat di bidang pendidikan.

Jasa layanan ini sering dinyatakan kepada masyarakat dalam bentuk janji agar diterima dan didukung. Hal ini karena kelangsungan hidup matinya perguruan tinggi terletak di tangan masyarakat sebagai pendukung dan yang berkepentingan (*stakeholder*) sebagai pengguna jasa. Masyarakatlah yang memberi masukan sumberdaya dan dana yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan akhirnya masyarakat pulalah yang nantinya akan menerima dan memanfaatkan hasil layanan yang diberikan oleh sebuah perguruan tinggi. Kalimat ini memberi arti bahwa antara masyarakat dan pihak perguruan tinggi mempunyai hubungan yang saling memberi dan pertukaran (*take and give*). Jadi, wajarlah jika perguruan tinggi dituntut tanggungjawabnya atas jasa layanan yang dinyatakan (dijanjikan) kepada masyarakat. Tanggungjawab itu dinyatakan sebagai akuntabilitas perguruan tinggi sebagai lembaga penyedia pendidikan untuk masyarakat. Hal ini diberikan atas peran dan fungsinya yang dilaksanakan, atas pelayanan yang diberikan, dan kinerja penyelenggaranya. Untuk itu, hal utamanya adalah bagaimana mendayagunakan sumber daya dan dana

yang ada, serta sejauh mana kinerja yang dilakukan agar mencapai tujuan yang telah menjadi komitmennya.

Berdasarkan penjelasan inilah, sebuah perguruan tinggi harus memberi penjaminan mutu (*quality assurance*) kepada masyarakat. Hal ini sebagai tuntutan akuntabilitas dan tanggungjawabnya atas pengelolaan yang dilakukan.

Secara konteks bahwa harapan masyarakat (*stakeholder*) harus diperhatikan sebagai langkah awal melakukan sebuah penelitian evaluasi kebijakan penjaminan mutu di perguruan tinggi. Penjaminan mutu seperti apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa di zaman sekarang? Selain itu, apakah lingkungan kampus layak/menunjang dilaksanakannya kebijakan penjaminan mutu? Selain itu, perlu juga diketahui kekuatan dan kelemahan pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu. Kemudian mengkaji hal apa yang melatarbelakangi sehingga ada kelemahan dan kemudian menggunakan kekuatan yang ada untuk mengimplementasikannya.

E. Urgensi Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi

Pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan suatu keharusan. Tidak lain sebagai tanggung jawab perguruan tinggi terhadap masyarakat dan pemerintah. Hal ini mengacu pada kebijakan pemerintah dan termaktub dalam pasal 51 Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi "Pengelolaan sistem pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan"⁵. Selain itu juga mengacu pada penetapan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) 2003-2010 yang mengatakan "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven*"⁶. Selain amanat pasal tersebut juga termaktub dalam PP No. 19 Tahun 2005, pasal 91 ayat 1 tentang standar Pendidikan Nasional yang menyatakan

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2003, h.7.

bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan informal wajib melakukan penjaminan mutu.⁷Amanat yang tertuang dalam pasal 51 dan PP No. 19 tersebut di atas haruslah dilaksanakan oleh sebuah perguruan tinggi.

F. Badan Penjamin Mutu sebagai Penegak Citra Perguruan Tinggi

1. Esensi Badan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (BPM-PI)

Badan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (BPM-PI) merupakan sebuah kebijakan yang tersusun dalam statuta perguruan tinggi. Dengan pembentukan badan ini, diharapkan agar apa yang menjadi tujuan dasar hukum lembaga bisa diimplementasikan. Berdasarkan hal tersebut maka visi, misi, tujuan dan program dari BPM-PI perguruan tinggi dianggap penting.

Apa yang tertuang dalam visi, misi, dan tujuan dari BPM-PI perguruan tinggi harus direalisasikan melalui program kerja. Program kerja yang disusun yaitu program kerja pokok yang ada antara lain

⁷ Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005.

tentang standarisasi, akreditasi, dan penjaminan mutu. Namun untuk merealisasikan program kerja ini selain tergantung pada semua *civitas academica*, juga pada lembaga yang khusus menangani penjaminan mutu yaitu BPM-PI.

2. Eksistensi BPM-PI di Perguruan Tinggi

Tak dapat dipungkiri, dalam perjalanan sebuah perguruan tinggi, pimpinan BPM-PI akan selalu mengalami beberapa pergantian sehingga bukan suatu hal yang mustahil jika sudah ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh masing-masing pimpinan tersebut dalam rangka merealisasikan program kerja antara lain, adanya SOP akademik, manual mutu, dibentuknya gugus-gugus penjaminan mutu di fakultas, adanya Satgas (satuan tugas) penjaminan mutu di tingkat jurusan/prodi, adanya penilaian program studi, dosen berprestasi secara periodik, praktik baik dan masih ada kebijakan-kebijakan yang lainnya tentang penjaminan mutu.

Selain itu, kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan pengimplementasiannya, harus di

evaluasi agar supaya kita semua bisa mengetahui dimana letak titik kekuatan dan kelemahan yang ada, sehingga kita bisa mengetahui dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Kebijakan-kebijakan yang telah diuraikan di atas memang sudah ada, akan tetapi tidak berjalan dengan semestinya karena seperti gugus penjaminan mutu dan satgas yang ada di jurusan/prodi, sesuai dengan hasil observasi penulis di beberapa jurusan ternyata mereka tidak mengetahui lagi siapa yang ditunjuk sebagai gugus penjaminan mutu dan satgas begitupun tugas yang harus mereka laksanakan. Hal ini terjadi antara lain karena pimpinan BPM-PI yang sering berganti sehingga kebijakan yang lama belum tuntas datang lagi kebijakan yang baru dan akibatnya pihak fakultas, jurusan/prodi tidak tahu lagi apa yang akan mereka kerjakan. Bahkan yang lebih tragis lagi ada juga dosen yang tidak memahami apa itu penjaminan mutu.

EVALUASI PENJAMINAN MUTU DI PERGURUAN TINGGI

3

A. Pentingnya Evaluasi Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi

Sebagai suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan penjaminan mutu, BPM-PI tentu mengalami banyak resistensi atau kendala dalam merealisasikannya. Kendala yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, perlu diadakan evaluasi. Sehingga dapat diketahui dimana letak kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu tersebut. Jika telah mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu tersebut, maka selanjutnya dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaiki kinerja lembaga BPM-PI. Hal ini semata-mata agar pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya.

Berikut akan dipaparkan mengenai konsep evaluasi yang dimaksud serta segala hal yang menunjang kebutuhan evaluasi penjaminan mutu.

B. Deskripsi Konseptual Evaluasi Kebijakan

1. Konsep Evaluasi

Evaluasi ialah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai.⁸ Menurut Malcolm, Provus pencetus *Discrepancy Evaluation* (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih. Evaluasi yaitu penilaian atas manfaat atau guna (Scriven, Glas dan Stufflebeam (1974).⁹ Menurut Howleth dan Ramesh (1995) yang dikutip Nugroho (2008) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga yaitu: **pertama**, evaluasi administratif yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan: (a) *effort*

⁸ Tyler di dalam Farida Yusuf Tayibnapis. *Evaluasi Program*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) h.3.

⁹ *Ibid*, h.100

evaluation, (b) *performance evaluation*, (c) *adequacy of performance evaluation* atau *effectiveness evaluation*, (d) *efficiency evaluation*, (e) *process evaluation*. **Kedua**, evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara hingga hak asasi manusia. **Ketiga**, evaluasi politik yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.¹⁰

Evaluasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah evaluasi administratif yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di sebuah perguruan tinggi

Tyler, sebagaimana yang dikemukakan oleh Stufflebeam menyatakan evaluasi merupakan proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai.¹¹ Evaluasi juga diartikan

¹⁰ Chazali H. Situmorang. *Kebijakan Nasional tentang Mutu Pekerja Sosial*. 2010.H.14.

¹¹ Stufflebeam, D.L. *Educational Evaluation and Decision Making* (Itaca Illinois: FE.Peacock, 1971),h..59.

sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang kebenaran atau keberhasilan suatu tujuan.¹² Definisi lain tentang evaluasi adalah penentuan sampai seberapa jauh sesuatu berharga, bermutu, atau bernilai, yang meliputi evaluasi produk dan evaluasi proses. Evaluasi produk memusatkan perhatian pada produk atau efek yang dihasilkan oleh mahasiswa, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan evaluasi proses memusatkan perhatian pada komponen-komponen dari proses perkuliahan itu sendiri.¹³

Evaluasi dapat berarti sebagai suatu proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang telah ditetapkan untuk kemudian diambil keputusan atas objek yang dievaluasi.¹⁴ Pendapat lain tentang evaluasi yaitu sebagai suatu proses pengumpulan data dan analisis data

¹² James R. Sanders, et.all. *The Program Evaluation Standars*. 2 edition. (California: Sage Publication Inc., 1994), h.3.

¹³ Winkel, *op.cit*.h.87.

¹⁴ Djaali, Puji Mulyono dan Ramly. *Pengukuran Dalam Pendidikan* (Jakarta:PPs UNJ, 2000). h.2.

sistematis yang dilakukan untuk mengambil keputusan.¹⁵

Selain definisi evaluasi di atas, evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Evaluasi juga sebagai penilaian profesional atau sebagai proses yang memudahkan seseorang untuk membuat suatu penilaian mengenai sifat yang diinginkan atau nilai dari sesuatu. Jadi, seseorang dapat mengevaluasi apakah itu data secara kuantitatif maupun kualitatif.

Suchman dan Anderson dalam Arikunto (2009) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Masih dalam Arikunto yang dikemukakan oleh Worthen dan Sanders bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu

¹⁵ Gay, *Educational Evaluation and Measurement, Competencies for analysis and Application*. (Columbus Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company, A Bell and Howell Company, 1979), psytg.9.

tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.¹⁶

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi yang diperoleh untuk menentukan apakah sesuatu berhasil sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan terkait dengan evaluasi merupakan tindakan yang diambil oleh seseorang atau lembaga dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan suatu kebijakan. Evaluasi juga digunakan untuk memeriksa apakah kebijakan yang diimplementasikan berhasil atau tidak sehingga dapat diperoleh suatu keputusan, apakah kebijakan tersebut diteruskan, ditunda, atau lebih ditingkatkan. Evaluasi yang baik akan memperoleh keputusan yang baik pula. Akan tetapi,

¹⁶ Arikunto, Suharsimi. *Evaluasi Program Pendidikan*, PT Bumi Aksara, 2009. h.1.

keputusan yang diambil merupakan perhitungan tentang hasil dan risiko dari pengambilan setiap keputusan tersebut. Kemudian keputusan yang diambil dijadikan indikator untuk memperbaiki atau menyempurnakan penerapan kebijakan yang ditempuh.

2. Konsep Kebijakan

Kesamaan dengan mengawali kajian tentang analisis kebijakan pendidikan, perlu dikemukakan batasan dari kata kebijakan (*policy*). Menurut Dunn, kebijakan memiliki kata politik yang mengandung arti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.¹⁷ Dengan demikian, kebijakan pada pendidikan tinggi menyangkut penanganan masalah-masalah publik tentang pendidikan, baik pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi.

Secara lebih sederhana, First merumuskan: *“Policy can be simply defined as a vision of where we want to go and guidelines for getting there”*. Artinya, bahwa kebijakan adalah suatu visi kemana kita ingin

¹⁷ Dunn, W.N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Penyunting Muhadjir). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta 2000.

pergi dan sebagai pedoman untuk mencapainya.¹⁸ Sedangkan menurut Robbins dan Coulter bahwa kebijakan memberi garis-garis pedoman untuk menyalurkan pemikiran seorang manajer kearah tertentu.¹⁹ Singkatnya, kebijakan adalah suatu pedoman yang menetapkan parameter-parameter untuk membuat keputusan.

Guba (dalam Duke & Canady) mengidentifikasi ke dalam delapan konsep tentang kebijakan sebagai berikut: (1) kebijakan adalah suatu pernyataan tentang tujuan-tujuan, (2) kebijakan adalah sejumlah keputusan yang diakumulasi dari susunan pengaturan yang digunakan untuk sejumlah aturan, pengawasan, promosi, pelayanan, dan hal-hal lain yang mempengaruhi otoritas, (3) kebijakan adalah suatu panduan untuk kebebasan bertindak, (4) kebijakan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah, (5) kebijakan adalah perilaku yang diberi sanksi, (6) kebijakan

¹⁸ First, P.F, *Educational Policy for School Administrators*. Boston: Allyn and Bacon, Inc. 1992.

¹⁹ Robbins, S.P, *Essentials of Organizational Behavior Englewood Cliffs*. New Jersey; prentice-Hall, Inc. 1989.

adalah suatu norma sebagai ciri yang konsisten dan keteraturan dalam sejumlah lingkup tindakan substantive, (7) kebijakan adalah hasil dari sistem pembuatan kebijakan, dan (8) kebijakan adalah pengaruh dari system pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan sebagaimana yang dikenai kebijakan itu.²⁰

Agar tidak terjadi beragam persepsi tentang pengertian kebijakan terutama dalam kaitan dengan penelitian ini, maka perlu diberikan batasan secara operasional untuk dijadikan acuan dalam penulisan ini. Berdasarkan beberapa batasan di atas, maka pengertian kebijakan menurut penulis adalah sebagai suatu strategi yang menghasilkan sejumlah keputusan yang dibuat oleh seorang atau sekelompok orang yang ada dalam suatu lembaga pendidikan dalam usaha memilih alternatif dan cara-cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Masih tentang pengertian kebijakan, bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

²⁰ Duke, D.L & Canady, F.L. *School Policy*. McGraw-Hill, Inc. 1991.

Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena dengan kebijakan itu).²¹ Titmuss dalam (Edi Suharto) mendefinisikan bahwa kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, kebijakan menurutnya senantiasa berorientasi kepada masalah dan berorientasi kepada tindakan. Dengan demikian kebijakan dapat dinyatakan sebagai suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.²²

Menurut Anderson, kebijakan didefinisikan sebagai kegiatan yang mempunyai tujuan yang diikuti satu atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau hal yang menjadi perhatian. Masalah yang tidak berstruktur (berciri utama konflik atau ketidaksepakatan) memerlukan metodologi yang bersifat holistik yang cenderung

²¹ Suharto Edi, *Analisis kebijakan Publik*, Alfabeta Bandung 2006

²² *Ibid.*, h.145

menerapkan berbagai perspektif untuk mendekati masalah yang sama dalam mendefinisikan sifat dari masalah itu sendiri. Masalah yang terstruktur dengan baik pada tingkat mikro, cenderung dicarikan solusinya oleh pembuat kebijakan menyusul kesibukan pada masalah yang rumit yang mengandung konflik atau ketidaksepakatan tentang sifat masalah dan solusi yang potensial. Masalah tingkat tinggi meliputi isu bagaimana membantu pembuat kebijakan untuk mengetahui apa yang seharusnya diketahui, dan bagaimana untuk memutuskan aspek masalah mana yang harus dipecahkan atas dasar pengetahuan konseptual tertentu.

Seyogyanya dalam pembuatan kebijakan pendidikan tinggi hendaknya didasarkan pada analisis kebijakan. Dalam kaitan ini, Dunn menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan.²³ Masih mengenai kebijakan Dunn mendefinisikan analisis

²³ Dunn, W. N, *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2000.

kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk tujuan menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.²⁴ Menurut Weimer mencermati analisis kebijakan pertama-tama dari segi produknya, yaitu produk dari analisis kebijakan yaitu advis yang menginformasikan keputusan kebijakan publik.²⁵

Definisi lain tentang analisis kebijakan adalah mensintensiskan informasi termasuk hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan format keputusan kebijakan yang ditentukan dari sejumlah alternatif pilihan dan menentukan informasi yang relevan

²⁴ Ibid

²⁵ Weimer, L. David & Vining R. Aidan, *Policy Analysis Concepts and Practice*, Prentice Hall New Jersey, 1991.

dengan kebijakan.²⁶ Analisis kebijakan dari pemikiran Quade dan Dunn yang disampaikan oleh Bardach yaitu suatu aktivitas politik dan sosial, oleh karena itu seseorang yang tertarik di bidang analisis kebijakan memerlukan suatu tanggung jawab mental dan intelektual dari kualitas hasil pekerjaan atau kegiatan di bidang analisis kebijakan.²⁷

Stoner mendefinisikan bahwa analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa, sehingga memberi landasan bagi pembuat kebijakan. Hasil keputusan analisis kebijakan merupakan penerapan dari isi manajemen, dan tidak bisa ditentukan oleh batas-batas disiplin ilmu tetapi berkembang sesuai situasi masa dan sifat dari persoalan.²⁸

Analisis kebijakan memiliki tiga pendekatan yaitu: 1) pendekatan empiris, yang berupaya

²⁶ Williams, Walter, *Social Policy Research and Analysis: The Experience in the Federal Social Agencies*, New York: American Elsevier Publishing, 1971.

²⁷ Bardach, Eugene, *A Practical Guide for Policy Analysis The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*, New York; Seven Bridges Press, 2000.

²⁸ Stoner, A. James dan Edward Freeman, *Management*, New Jersey: Prentice Hall, International Edition, 1989. p. 120.

menjawab permasalahan fakta-fakta; 2) pendekatan evaluatif , berupaya mencari beberapa nilai atas sesuatu; 3) pendekatan normatif, memberikan upaya tindakan atas apa yang harus dilakukan. Penelitian kebijakan ini bertujuan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi.

C. Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Penjaminan Mutu

Penelitian evaluasi ini sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah-masalah yang bersifat fundamental secara teratur. Hal ini untuk membantu para pengambil kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di perguruan tinggi. Pelaksanaan evaluasi ini menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatis.

Dalam artian, penelitian evaluasi kebijakan penjaminan mutu di perguruan tinggi dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaannya, mengetahui apa masalahnya, sehingga kebijakan ini akan berjalan dengan baik serta mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Pada akhirnya hasil dari evaluasi ini

akan memberikan suatu rekomendasi agar kebijakan penjaminan mutu akademik di perguruan tinggi akan dilaksanakan lebih baik lagi dari tahun-tahun kemarin.

D. Model-Model Evaluasi Kebijakan

Dalam ilmu evaluasi program pendidikan, ada banyak model yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Meskipun antara satu dengan yang lainnya berbeda, namun maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi. Tujuannya untuk menyediakan bahan bagi pengambil keputusan atau kebijakan dalam menentukan tindak lanjut suatu program. Model-model evaluasi ada yang dikategorikan berdasarkan ahli yang menemukan dan mengembangkannya, serta ada juga yang diberi sebutan sesuai dengan sifat kerjanya.

Ada beberapa ahli evaluasi program yang dikenal sebagai penemu model evaluasi adalah *Stufflebeam*, *Metfessel*, *Michael Scriven*, *Stake* dan *Glaser*. Kaufman dan

Thomas membedakan model evaluasi menjadi tujuh²⁹ yaitu:

1. *Goal Oriented Evaluation Model*

Goal oriented evaluation model ini merupakan model yang muncul paling awal. Adapun yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi ini dilakukan secara berkesinambungan, terus menerus, mengecek seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program. Model ini dikembangkan oleh Tyler.

2. *Goal Free Evaluation Model*

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Michael Scriven. Model ini berlawanan dengan model yang pertama yang dikembangkan oleh Tyler. Jika dalam evaluasi yang dikembangkan oleh Tyler, evaluator terus menerus memantau tujuan yaitu sejak awal proses kemudian melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah dapat dicapai. Sedangkan dalam model *goal free evaluation* justru melihat dari tujuan.

²⁹ Daryanto, *Evaluasi Pendidikan Jakarta: Rineka Cipta*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 72

Menurut Michael Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Melainkan perlu memperhatikan bagaimana kerja program dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif maupun yang negatif.

Adapun yang menjadi alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan, tetapi evaluator lupa memperhatikan seberapa jauh masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan akhir yang diharapkan oleh tujuan umum, maka akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak manfaatnya.

3. *Formatif-Sumatif Evaluation Model*

Model ini menurut Michael Scriven menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program

masih berjalan (evaluasi formatif) dan pada akhir program (evaluasi sumatif).³⁰

Berbeda dengan model yang pertama dikembangkan, pada model yang kedua ini evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan ketika sedang melakukan evaluasi. Tujuan evaluasi formatif memang berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Dengan demikian, model ini menunjuk tentang apa, kapan, dan tujuan evaluasi tersebut dilaksanakan. Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan kegiatan awal. Tujuan evaluasi formatif adalah untuk mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung.

Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian program. Fungsi evaluasi sumatif dalam pembelajaran dimaksudkan sebagai sarana

³⁰ Daniel L. Sufflebeam, Anthony J. Shinkfield, *Systematic Evaluation , aSelf-International Guide to Theory and Practice*, (Kluwer-Nijhoff Publishing, Michigan, USA, 1986), h.315.

untuk mengevaluasi posisi atau kedudukan individu dalam kelompoknya.

4. *Countenance Evaluation Model*

Model ini dikembangkan oleh Stake yang tambahannya diberikan oleh Fernandes (1984). Model ini menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu deskripsi dan pertimbangan serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program yaitu: (1) anteseden, (2) transaksi, (3) keluaran.

Menurut Stake, ketika evaluator tengah mempertimbangkan program pendidikan, mereka mau tidak mau harus melakukan dua perbandingan, yaitu:

- a. Membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain, dengan objek sasaran yang sama;
- b. Membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai.

Model ini jika dalam bahasa Indonesia artinya model deskripsi-pertimbangan.³¹

5. CSE-UCLA Evaluasi Model

CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu CSE dan UCLA. CSE singkatan dari *Center for the Study of Evaluation*, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari *University of Californian in Los Angeles*. Ciri dari model ini adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Fernandes memberikan penjelasan model ini menjadi empat tahap yaitu sebagai berikut.

a. *Needs assessment*

Dalam tahap ini evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah.

b. Program *planning*

Pada tahap ini evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Dalam tahap

³¹ Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 44.

perencanaan program PBM dievaluasi dengan cermat untuk mengetahui apakah rencana pembelajaran telah disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan,

c. *Formative evaluation*

Pada tahap ini evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dengan demikian evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam program,

d. *Summative evaluation*

Para evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi sumatif ini, diharapkan dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai, dan jika belum maka dicari bagian mana yang belum dan apa penyebabnya.

6. CIPP *Evaluation Model*

Model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan dikenal oleh *evaluator*. Model ini dikembangkan oleh Sufflebeam dan kawan-kawan di Ohio State University. CIPP

merupakan singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu:

- a. *Context evaluation* : Evaluasi terhadap konteks
- b. *Input evaluation* : Evaluasi terhadap masukan
- c. *Process evaluation* : Evaluasi terhadap proses

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi. Tidak lain sasaran tersebut adalah sasaran sebuah program kegiatan. CIPP adalah model evaluasi yang memandang program evaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian, jika tim *evaluator* sudah menentukan model CIPP sebagai model yang akan digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan, maka mau tidak mau mereka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya.³²

Dalam melaksanakan evaluasi kebijakan ini banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli di atas. Namun, dalam penelitian ini peneliti memilih model CIPP, *context, input, process*

³² H.J.X, Fernandes. *Evaluation of Educational Program*. (Jakarta: National Educational Planning and Curriculum, 1984) h. 192.

dan product. Sufflebeam adalah ahli yang mengusulkan pendekatan yang berorientasi kepada pemegang keputusan untuk menolong administrator membuat keputusan. Ia merumuskan evaluasi sebagai suatu proses yang menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.³³ Beliau membuat pedoman kerja untuk melayani para manajer dan administrator menghadapi empat macam keputusan pendidikan dan membagi evaluasi menjadi empat macam yaitu:

- a. *Context evaluation to serve planning decision.* Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program.
- b. *Input evaluation, structuring decision.* Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk

³³ Yusuf Farida, *Evaluasi Program*, Rineka Cipta Jakarta, 2000, h 14.

mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

c. *Process evaluation, to serve implementing decision.*

Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan sampai sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab prosedur dapat dimonitor, dikontrol, dan diperbaiki.

d. *Product evaluation, to serve recycling decision.*

Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan?

Keempat unsur model evaluasi CIPP ini merupakan satu rangkaian yang utuh. Namun, dalam pelaksanaannya seorang evaluator dapat saja melakukan satu jenis atau kombinasi dua atau tiga jenis evaluasi. Bertolak dari pemikiran Sufflebam dengan model CIPP, pada akhirnya dapat diketahui fungsi utamanya untuk membantu penanggung-jawab program dalam membuat keputusan. Beberapa alternatif keputusan antara lain:

meneruskan, memodifikasi, dan menghentikan program/kebijakan yang telah dievaluasi.



Zulaecha Ngiu

PELAKSANAAN EVALUASI KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU

4

Pembahasan pada bagian ini akan lebih memfokuskan pada pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu akademik di perguruan tinggi.

A. Polemik Kebijakan Penjaminan Mutu Akademik di Perguruan Tinggi

Kenyataan di lapangan, pihak prodi/jurusan sudah mengetahui tentang kebijakan penjaminan mutu akademik yang sudah ada berupa Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, SOP tersebut belum sepenuhnya dijalankan dan pihak lembaga yang telah ditunjuk untuk melakukannya yaitu BPM-PT pun belum sepenuhnya menyosialisasikan kepada jurusan. Walaupun sosialisasi tersebut pernah ada, namun hal itu hanya untuk pimpinan-pimpinan saja dan tidak berkelanjutan. Hal ini karena kepala BPM-PT diganti

lagi dengan yang baru sehingga kebijakan tersebut tidak berkesinambungan.

Kenyataannya, suasana kegiatan akademik di jurusan baru terlihat nanti pada saat kegiatan *review* kurikulum, akreditasi jurusan, ataupun rapat sebelum dan sesudah semester. Suasana kegiatan akademik yang terlihat ini tentunya di samping pelaksanaan rutin perkuliahan secara kuantitatif. Selain itu, kualitas dari suasana kegiatan akademik belum menjadi perhatian yang khusus bagi sebagian dosen dan jurusan/prodi. Hal ini terindikasi dari belum terisnya *monitoring* dan evaluasi oleh pihak dosen yang didapatkan peneliti dari dokumen hasil audit di beberapa jurusan yang telah dilakukan oleh tim auditor yang ditunjuk oleh BPM-PT.

Di samping hal tersebut di atas, juga dapat diobservasi tentang sarana prasarana akademik. Kurangnya ruang kuliah dan laboratorium, IT yang sering mengalami gangguan sehingga sering terlambat mengakses KHS dan KRS mahasiswa, juga pemenuhan sumber belajar berupa buku-buku perpustakaan di jurusan yang masih kurang, akses internet yang sering *ngadat*, serta media pembelajaran berupa LCD dan

lainnya yang masih kurang dan rusak. Inilah beberapa hal yang didapatkan pada survei awal ketika melakukan penelitian tentang evaluasi kebijakan penjaminan mutu akademik di perguruan tinggi

B. Evaluasi Kebijakan Penjaminan Mutu Akademik di Perguruan Tinggi

Kebijakan yang akan dievaluasi dalam penjaminan mutu di perguruan tinggi adalah kebijakan-kebijakan yang telah dibuat berhubungan dengan peningkatan mutu akademik di perguruan tinggi tersebut. Tujuan dan sasaran diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu ini adalah untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan yang telah diambil/dibuat yang diwujudkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut sudah diimplementasikan atau belum. Jika belum, maka apa alasannya dan jika sudah dilaksanakan, apakah pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu tersebut sesuai dengan kriteria penjaminan mutu akademik yang telah dibuat oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM-PT) atau tidak.

Pada bagian sebelumnya sudah diuraikan tentang rumusan kebijakan yaitu sebagai suatu strategi yang

menghasilkan sejumlah keputusan. Rumusan kebijakan ini dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang ada dalam suatu lembaga pendidikan. Strategi yang dilakukan ini adalah suatu usaha untuk memilih alternatif dan cara-cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian kebijakan tersebut, jelaslah bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perguruan tinggi ini adalah sebagai suatu strategi yang harus dilaksanakan oleh semua pihak. Hal ini tidak lain dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat khususnya yang menyangkut tentang penjaminan mutu akademik itu sudah dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Di dalamnya memuat tentang standar kurikulum prodi, standar sistem pembelajaran, standar pengembangan dosen dan tenaga penunjang akademik, standar kemahasiswaan, standar sarana dan prasarana akademik, standar sistem informasi, standar penelitian dan pengabdian pada masyarakat, standar sistem penjamin mutu, dan standar lulusan.

C. Kriteria Evaluasi Kebijakan Penjaminan Mutu Akademik

Berdasarkan deskripsi kebijakan, maka ditetapkan kriteria evaluasi yang akan digunakan oleh sebagai tolak ukur efektivitas pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu akademik di sebuah perguruan tinggi. Kriteria evaluasi ini merupakan kriteria penjaminan mutu akademik yang dapat dievaluasi dari pelaksanaan renstra, SOP, dan pedoman akademik serta melihat kesesuaian antara misi dan misi perguruan tinggi dengan visi misi jurusan/prodi. Kriteria ini akan dijadikan sebagai patokan untuk mengukur tingkat pencapaian kebijakan penjaminan mutu akademik. Adapun kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut.

Tabel 4.1 Kriteria Evaluasi Kebijakan Penjaminan Mutu Akademik

Komponen	Kriteria Penelitian Evaluasi	Kriteria
Konteks (<i>Context</i>)	Adanya Kebijakan 1. Visi Misi 2. Renstra 3. SOP 4. Pedoman Akademik	1. Terdapat konsistensi visi misi perguruan tinggi dan jurusan/prodi. 2. Tersosialisasinya Renstra. 3. Tersosialisasinya

		SOP. 4. Tersosialisasinya Pedoman Akademik
Masukan (<i>Input</i>)	1. Ketersediaan Sumberdaya 2. SDM (dosen, tenaga penunjang akademik, tenaga Penjamin mutu) 3. Sarana dan Prasarana (Gedung Perkuliahan, Laboratorium, Perpustakaan dan ruang BPM-PT) 4. Dukungan Dana 5. Kurikulum	1. Dosen berstrata S2 dan S3 2. Adanya pegawai administrasi dan penjaminan mutu 3. Sarana prasarana memadai 4. Adanya dana 5. Kesesuaian kurikulum dengan kompetensi
Proses (<i>Process</i>)	1. Rekrutmen Mahasiswa 2. Rekrutmen Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik 3. Pelaksanaan perkuliahan dan praktikum. 4. Hasil Penelitian Dosen dan	1. Keterpenuhan kriteria rekrutmen calon mahasiswa 2. Keterpenuhan criteria calon dosen dan tenaga penunjang akademik 3. Keterpenuhan standar-standar proses perkuliahan dan praktikum.

	Pengabdian Masyarakat	4. Keterpenuhan standar-standar penelitian dan pengabdian masyarakat.
Produk (<i>Product</i>)	1. Hasil belajar mahasiswa/IPK 2. Waktu tunggu kerja lulusan 3. Hasil Penelitian dan pengabdian masyarakat.	1. Hasil belajarnya baik, IPK 3,5 ke atas. 2. Cepat terangkatnya di dunia kerja 3. Keterpenuhan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat

Kriteria-kriteria tersebut di atas sebagai ukuran dan patokan standar yang obyektif, yang hasil evaluasinya dari lapangan kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

D. Standar Akademik Perguruan Tinggi

Standar akademik sebuah perguruan tinggi merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik lembaga dan *civitas academica* dalam naungannya. Secara umum, standar akademik perguruan tinggi merupakan landasan bagi pengembangan program akademik, sumberdaya

akademik, prosedur kegiatan akademik, dan evaluasi akademik.

Secara khusus, standar akademik perguruan tinggi merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi, dan tujuan lembaga program pendidikan, lembaga pengembangan kurikulum, proses pembelajaran mahasiswa, dosen dan sumberdaya manusia, sumber belajar, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan mutu berkelanjutan.

Untuk kegiatan pendidikan, standar akademik menjadi landasan bagi proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Untuk dosen, standar akademik mengarahkan penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu dan inovatif, sedangkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat standar akademiknya mengarahkan kegiatan ini sesuai peran universitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.

E. Model Evaluasi yang Diterapkan

Dengan banyaknya model evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli pada bagian bab

sebelumnya, dipilih model evaluasi CIPP dalam evaluasi kebijakan penjaminan mutu di sebuah perguruan tinggi. Model evaluasi CIPP dipilih dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kesesuaian antara kebutuhan mahasiswa dengan pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan dari strategi, sarana prasarana, sumber daya yang digunakan (tenaga pengajar dan tenaga administrasi), serta hal-hal lain yang digunakan dalam merealisasikan tujuan dari kebijakan tersebut. Selain itu, model ini digunakan untuk memperoleh ketepatan atau ketidaktepatan kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Kemudian, model ini juga digunakan untuk melihat ketercapaian tujuan dari kebijakan yang telah dilaksanakan ketika dibandingkan dengan tujuan dari kebijakan yang telah ditentukan.

F. Tahapan Evaluasi Kebijakan Penjaminan Mutu

Komponen dan aspek yang dievaluasi terkait dengan kebijakan penjaminan mutu di perguruan tinggi

mengacu pada masalah-masalah yang ditemui. Berikut adalah tahapan komponen yang akan dievaluasi.

1. Komponen konteks

- a. Konsistensi Visi Misi perguruan tinggi dengan jurusan.
- b. Jenis kebijakan berupa: renstra, SOP, dan pedoman akademik.

Kedua konteks tersebut akan dijadikan pertanyaan dalam sebuah wawancara yang dilakukan untuk mengungkap kedua hal di atas. Hal-hal tersebut menyangkut visi dan misi, adanya jenis-jenis kebijakan perguruan tinggi, sasaran dan tujuan baik kepada, rektor, fakultas, jurusan dan program studi, serta pihak BPM-PT. Lebih jelasnya komponen konteks penjaminan mutu dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Komponen Konteks Penjaminan Mutu

Objek	Data yang diharapkan	Indikator
a. Visi dan Misi perguruan tinggi	Informasi tentang visi dan misi serta konsistensinya antara visi misi	Ada rumusan visi misi yang jelas

	perguruan tinggi dengan jurusan.	
b. Renstra	Informasi tentang Renstra perguruan tinggi	Ada Renstra yang jelas
c. SOP	Informasi tentang SOP	Ada SOP yang jelas
d. Pedoman Akademik	Informasi tentang Pedoman Akademik	Ada Pedoman Akademik yang jelas

2. Komponen Input

Tabel 4.3 Komponen Input

Objek	Data yang diharapkan	Indikator
a. Sumberdaya manusia (dosen, pegawai)	Kualitas dosen dan pegawai.	- Jumlah dosen - Tingkat pendidikan - Bidang keahlian
b. Kurikulum	Struktur kurikulum Beban SKS	- Silabus, perangkat pembelajaran
c. Pembiayaan	Perencanaan anggaran	- Sumber dana - Pertanggungjawaban

		- Penggunaan dana
d. Sarana Prasarana	Perencanaan fasilitas	- Tersedianya fasilitas perkuliahan
e. Rekrutmen Dosen	Jumlah dosen	- Kesesuaian kompetensi
f. Rekrutmen Mahasiswa	Jumlah mahasiswa	- Daya tampung - Jumlah pendaftar - Yang diterima

Dalam komponen input ini terdiri atas analisis dokumen dan wawancara yang ditujukan kepada ketua jurusan/prodi, Rektor, PR1, PR2, Biro Akademik, dan ketua BPM-PT. Untuk analisis dokumen, dilakukan penelusuran dokumen tentang rekrutmen mahasiswa baru dengan mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, daya tampung, jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi dan dosen yang dilakukan. Hal ini untuk melihat apakah sesuai dengan kriteria dan standar perekrutmen yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator instrument rekrutmen dosen meliputi:

- 1) kualifikasi pendidikan minimal strata dua (S2),
- 2) mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan
- 3) penempatan yang sesuai dengan bidang keahlian.

Inventaris ceklis dilakukan untuk menilai kelayakan sarana prasarana yang terkait dengan penjaminan mutu misalnya ruangan untuk kuliah, laboratorium, perpustakaan, sistem informasi, dan lain-lain. Hasil identifikasi tentang sarana prasarana ini dikategorikan dalam:

- 1) kondisi baik dan berfungsi,
- 2) kondisi baik dan kurang berfungsi,
- 3) tidak ada/rusak.

Wawancara untuk menilai kurikulum antara lain:

- 1) kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan,
- 2) kurikulum harus memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan,

- 3) kurikulum harus dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan, dan kedalaman materi,
- 4) kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus *direview* dalam kurun waktu yang tertentu, serta faktor pembiayaannya, dan juga ingin mengetahui beban jumlah SKS.

3. Komponen Proses

Tabel 4.4 Komponen Proses Penjaminan Mutu

Objek	Data yang diharapkan	Indikator
a. Perkuliahan dan praktikum	Pelaksanaan perkuliahan dan praktikum	Jadwal dan perangkat perkuliahan
b. UTS dan UAS	Pelaksanaan UTS dan UAS	Jumlah peserta dan nilai yang diperoleh
c. Bimbingan Tugas Akhir	Pelaksanaan bimbingan tugas akhir mahasiswa	Jumlah konsultasi, lama bimbingan
d. Ujian Sarjana	Pelaksanaan Ujian Sarjana	Jumlah peserta dan Lamanya studi
e. <i>Monitoring</i> evaluasi	Pelaksanaan <i>monitoring</i> evaluasi	- Strategi <i>monitoring</i>

		evaluasi - pelaksana
--	--	-------------------------

Komponen proses ini merupakan rekaman proses yang terdiri dari:

- 1) pelaksanaan perkuliahan dan praktikum, sistem pembelajaran yang dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkinya,
- 2) pembelajaran dilakukan dengan berbagai strategi dan teknik,
- 3) pelaksanaan pembelajaran untuk memonitor kehadiran dosen dan mahasiswa, penyusunan perangkat perkuliahan serta penilaian hasil belajar yang semuanya dapat dilihat dari evaluasi diri.

Selain tentang pembelajaran, dalam instrumen proses ini juga dapat dilihat antara lain pada: 1) pelaksanaan UTS dan UAS yaitu bagaimana jumlah pesertanya dan nilai yang diperoleh, 2) pelaksanaan bimbingan tugas akhir mahasiswa, yaitu dapat dilihat dari berapa jumlah mahasiswa yang dibimbing dan lamanya pembimbingan, 3)

pelaksanaan ujian sarjana dapat dilihat dari jumlah peserta dan lamanya studi, serta 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dapat dilihat bagaimana strategi yang digunakan dalam monitoring evaluasi dan unsur pelaksanaannya.

4. Komponen Produk

Tabel 4.5 Komponen Produk Penjaminan Mutu

Obyek Penelitian	Data yang diharapkan	Indikator
a. Hasil Belajar Mahasiswa	Nilai mahasiswa rata-rata	IPK
b. Waktu tunggu kerja lulusan	Penelusuran alumni	Waktu tunggu kerja lulusan
c. Penelitian dan pengabdian masyarakat	Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	Laporan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dan jurnal

Untuk mengungkap bagaimana hasil dari pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di perguruan tinggi yang bisa dilihat dari komponen

produk, maka digunakan instrumen wawancara kepada ketua jurusan/prodi, wakil rektor 1, mahasiswa, alumni, lemlit dan pimpinan perguruan tinggi. Untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu yang dapat dilihat dari hasil belajar mahasiswa melalui IPK, waktu tunggu kerja lulusan, serta hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Hal ini harus disosialisasikan kepada *civitas* perguruan tinggi dan menjadi membudaya. Hal ini tentu pada akhirnya dapat mendukung adanya prestasi, baik lokal, nasional, maupun internasional.



Zulaecha Ngiu

STUDI KASUS EVALUASI KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU DI PERGURUAN TINGGI

5

Pada bab 5 ini akan dideskripsikan hasil evaluasi kebijakan penjaminan mutu akademik di salah satu perguruan tinggi yaitu Universitas Negeri Gorontalo melalui empat tahapan, yaitu: a) konteks (*context*), b) masukan (*input*), c) proses (*process*), dan d) produk (*product*). Pada setiap tahapan ini akan dievaluasi masing-masing aspek, tujuan dan hasilnya. Hal tersebut kemudian yang akan menggambarkan efektivitas dari setiap tahapan. Berikut penjabarannya.

A. Komparasi Hasil Evaluasi Konteks dengan Kebijakan Penjaminan Mutu Akademik

1. Hasil Evaluasi Konteks (*Context*)

Evaluasi konteks ini mencakup analisis terhadap visi dan misi yang ada di jurusan dan konsistensinya dengan visi dan misi lembaga. Selain itu, berbagai jenis kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang berkaitan dengan penjaminan mutu akademik yang telah dilaksanakan. Berikut akan diuraikan mulai dari: a) visi dan misi, b) renstra, c) SOP, dan d) pedoman akademik.

a. Visi dan Misi

Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam visinya menunjukkan sebagai perguruan tinggi yang menjadi pioner dalam pengembangan peradaban sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Visi ini juga menunjukkan pandangan UNG untuk menyatu dalam masyarakat karena melalui visi ini, UNG mengaktualisasikan diri dalam pengembangan peradaban, bukan saja untuk *civitas* dan lulusannya tetapi juga bagi

masyarakat dalam wilayahnya. Universitas sebagai pelopor peradaban mengandung makna bahwa UNG menjadi perguruan tinggi terdepan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan moral berdasarkan tata nilai universitas.

UNG memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Menghasilkan lulusan yang bermutu, profesional dan beradab;
- 2) Meningkatkan peran UNG dalam pengembangan iptek dan pengabdian pada masyarakat;
- 3) Menata kelembagaan dan pencitraan publik.

Adapun visi dan misi setiap prodi/jurusan adalah cukup variatif sesuai dengan bidang ilmu masing-masing jurusan. Yang diharapkan visi dan misi jurusan tersebut adalah konsisten dengan visi dan misi lembaga. Sehingga ada kesatuan langkah dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Hasil wawancara tentang konsistensi visi dan misi fakultas/jurusan dengan visi dan misi

lembaga dalam hal ini universitas, rata-rata responden menjawab sama yaitu ada konsistensi. Visi dan misi fakultas adalah perwujudan dari visi dan misi universitas yang isi dari visinya sebagian besar sama yaitu mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan misinya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang disesuaikan dengan jurusan dan keahlian masing-masing.

Uniknya, di antara beberapa jurusan yang diwawancarai tentang visi dan misi ini terdapat dua jurusan yang visinya adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang beriptek dan berimtaq. Hal ini mendukung visi dari universitas yaitu sebagai universitas pelopor peradaban yang lebih menekankan kualitas sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan bermoral.

Dengan demikian, hasil evaluasi tentang konsistensi visi dan misi jurusan dan

universitas yaitu terdapat konsistensi pada dua jurusan yang menekankan pada moral atau imtaq. Sementara jurusan lain yang diwawancarai dalam visinya lebih menggambarkan pada keahlian sesuai dengan disiplin ilmunya. Demikian pula konsistensi visi dan misi BPM-PI dengan visi dan misi Universitas sesuai dengan wawancara dengan ketua BPM-PI, hanya lebih menekankan pada tuntutan penjaminan mutu yang berstandar nasional dan global tetapi tidak memasukkan tentang moral. Namun, secara garis besarnya memiliki unsur kesamaan.

b. Rencana Strategis (Renstra)

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan rencana strategi yang telah ditetapkan, maka kebijakan dan program dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap situasi internal dan eksternal UNG. Hal ini terkait dengan tantangan nyata (*threats*) yang dihadapi di depan, besarnya peluang (*opportunities*) yang dimiliki, dan bisa dimanfaatkan, kelemahan

(*weaknesses*) yang diperkirakan dapat menjadi penghambat dan harus diatasi, serta daya saing dan kekuatan (*strengths*) yang sesungguhnya dapat dioptimalkan oleh institusi. Tentunya hal ini adalah untuk mencapai visi misi, tujuan, dan target.

Kebijakan dan program yang ditetapkan ini sesungguhnya mengarah pada pelaksanaan 4 (empat) agenda yang telah ditetapkan dalam renstra, sehingga kebijakan-kebijakan dan program ini saling terkait satu sama lainnya dalam bingkai penciptaan daya saing *civitas* yang cerdas, terampil, dan berkarakter.

Dalam melaksanakan evaluasi pada renstra ini lebih dikhususkan pada renstra tahun 2006-2010. Hal ini karena renstra revisi tahun 2010-2014 baru mulai dilaksanakan. Renstra 2006-2010 terkenal dengan 4 (empat) agenda, sedangkan renstra tahun 2010-2014 terkenal dengan pelaksanaan 4 (empat) pilar. Hal ini juga telah diuraikan oleh pimpinan universitas bahwa 4 pilar inilah yang telah ditetapkan

dalam rangka mencapai visi dan misi UNG tersebut. Pada renstra tahun 2006-2010 ada 4 (empat) agenda yang telah dilaksanakan yaitu UNG Bermutu, Modern, Bermartabat, dan Mandiri (UNG BMBM). Berikut penjabarannya.

- 1) Agenda pertama adalah penciptaan mutu akademik (*Quality Assurance*) melalui pengembangan sumberdaya manusia (UNG bermutu)). Agenda ini sangat penting dilaksanakan karena sasarannya yaitu menghasilkan lulusan yang bermutu dan profesional di bidangnya, serta memiliki moral dan motivasi yang tinggi dalam memasuki/menciptakan lapangan kerja. Dalam agenda ini ada 3 strategi yang akan dilaksanakan antara lain: a) peningkatan kualitas staf pengajar dan tenaga penunjang akademik, b) peningkatan kualitas proses pembelajaran, c) peningkatan kualitas sarana pembelajaran.

- 2) Agenda kedua adalah modernisasi kampus melalui pengembangan sistem yang ditunjang oleh informasi teknologi (UNG modern) dengan strateginya yaitu peningkatan layanan bidang pendidikan.
- 3) Agenda ketiga adalah mewujudkan kampus yang bermartabat melalui pencitraan UNG (UNG bermartabat) dengan sasaran strateginya yaitu: 1) peningkatan aktualisasi nilai-nilai religius, 2) pengadaan dan pemeliharaan sarana ibadah dan sarana *softskill*, 3) pelatihan bagi peneliti muda guna mengintensifkan kemitraan penelitian (skala lokal, regional, nasional, internasional, 4) melakukan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengakuan hak kekayaan intelektual, 5) mendorong dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Agenda keempat adalah mewujudkan kemandirian UNG menuju otonomi (UNG mandiri) dengan strateginya yaitu: 1)

menata kelembagaan, 2) mendorong terciptanya peningkatan kinerja setiap unit kerja berdasarkan tata nilai universitas dengan memperhatikan pola ilmiah pokok, perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat, dan peningkatan kualitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset.

Renstra yang telah diuraikan di atas memang telah ada. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi/kajur sebagian besar mereka tidak mengetahuinya. Hal ini biasanya karena hanya disampaikan pada saat rapat-rapat penting dan kurang disosialisasikan pada warga *civitas academica* UNG. Padahal hal ini perlu diperhatikan agar semua mengetahui program/kebijakan apa saja yang akan dilaksanakan. Menurut mereka, semua program sudah bagus. Namun, akan lebih bagus jika kalangan *civitas academica* mengetahuinya. Sehingga dalam mengejewantahkan renstra di

tiap jurusan juga bisa mengacu pada renstra UNG.

Rencana Strategis BPM-PT antara lain sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kemampuan dukungan fasilitas pengelolaan BPM-PT.
- 2) Secara terus menerus memantapkan upaya percepatan ketersediaan pengadaan fasilitas akademik yang bermutu.
- 3) Memantapkan kegiatan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan SOP.
- 4) Memantapkan kegiatan revisi dan penyempurnaan SOP.
- 5) Memberikan penyegaran tentang perubahan dan strategi pengembangan mutu PT.
- 6) Melaksanakan penyebaran *good practice* bagi pimpinan fakultas/jurusan/prodi.
- 7) Memberikan kesempatan kepada seluruh dosen muda untuk mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan.

- 8) Mewajibkan seluruh dosen menyusun silabus/SAP/kontrak perkuliahan.
- 9) Memotivasi dan memberikan kesempatan kepada dosen untuk menulis bahan ajar perkuliahan.
- 10) Memfasilitasi dan mewajibkan dosen mengikuti lokakarya dan pelatihan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
- 11) Melakukan *monitoring* dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran.
- 12) Mewajibkan program studi untuk menyusun laporan evaluasi diri dan mengisi borang akreditasi.
- 13) Mewajibkan seluruh institusi/ kelembagaan: universitas, fakultas, lembaga, biro, badan, UPT, pusat, dan tim pengembang untuk kegiatan penataan dan persiapan akreditasi institusi (kelembagaan).
- 14) Menyusun pedoman penjaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan tinggi UNG.
- 15) Melaksanakan lokakarya dan sosialisasi pengembangan standar mutu akademik.

- 16) Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan karir alternatif bagi mahasiswa.
- 17) Meningkatkan kualitas mutu pembelajaran melalui upaya memfasilitasi dan memotivasi dosen untuk memanfaatkan media pembelajaran.
- 18) Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi internal program kegiatan akademik tingkat kelembagaan maupun program lain melalui program hibah kompetisi khusus yang berkenaan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- 19) Tersusunnya pedoman manajemen kendali mutu melalui PDCA/SDCA.
- 20) Memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang manajemen kendali mutu melalui model PDCA/SDCA.
- 21) *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik secara berkala dan berkelanjutan.

Renstra yang dibuat oleh BPM-PT tersebut sudah ada. Namun, sesuai dengan data hasil wawancara dengan sekretaris BPM-PT dikatakan bahwa renstra ini sudah disosialisasikan ke jurusan/prodi. Namun hanya sebatas pada pimpinan saja, untuk dosen dan mahasiswa belum pernah disosialisasikan. Jawaban senada juga didapatkan dari sebagian ketua jurusan karena memang kegiatan atau programnya sudah dibuat dan dilaksanakan. Hanya saja belum tersosialisasikan. Alasannya, setelah renstra tersebut dibuat dan akan disosialisasikan, kepala BPM-PT sudah diganti. Sehingga rencana sosialisasi tersebut tidak tidak berkelanjutan.

c. Pedoman Akademik

Buku pedoman akademik UNG disusun dengan harapan dapat dijadikan acuan atau panduan dalam melaksanakan kegiatan akademik. Buku ini disusun berdasarkan kebutuhan serta tujuan jurusan, fakultas, dan lembaga serta badan. Dengan demikian, buku

ini bersifat mengikat dan berlaku untuk seluruh *civitas academica* UNG (dosen, pegawai dan mahasiswa termasuk seluruh unsur pimpinan).

Adapun buku pedoman akademik memuat beberapa komponen di antaranya: kalender akademik, informasi umum, sejarah dan hari lahirnya UNG, sistem penyelenggaraan akademik, layanan universitas, etika kehidupan akademik, kemahasiswaan, dan lampiran penjelasan tentang fakultas dan prodi.

Sistem penyelenggaraan akademik meliputi bidang keilmuan, jenis pendidikan, SKS dan beban studi, kurikulum, satuan kegiatan perkuliahan, praktikum, PKL, PPL dan KKS, sistem rekrutmen mahasiswa, registrasi mahasiswa, cuti kuliah, PA, penelitian, pengabdian pada masyarakat, penilaian keberhasilan, syarat dan waktu penyelesaian studi, dan pengembangan *soft skills* bagi mahasiswa.

Dengan adanya buku pedoman akademik diharapkan semua *civitas academica* benar-benar

menjadi acuan dan panduan dalam melaksanakan kegiatan akademik di UNG. Berdasarkan hasil wawancara, pedoman akademik yang telah dibuat masih akan direvisi dan akan disesuaikan dengan visi misi universitas yang akan menjadikan UNG sebagai universitas riset. Harapan ini akan terwujud jika pedoman akademik benar-benar menjadi acuan dan panduan dalam kegiatan akademik di UNG. Hal ini sesuai dengan data dan hasil wawancara dengan beberapa kajur/kaprodi bahwa kadang kebijakan yang diambil atau ditempuh tidak sesuai dengan yang ada di dalam buku pedoman akademik. Misalnya dalam pemberian penilaian kepada mahasiswa, para dosen merasa ragu dan menanyakan apakah pemberian penilaian memakai angka 1-4 atau 0-100. Sebab format penilaian (K11) yang diberikan untuk setiap jurusan berbeda pula. Dosen pengampu mata kuliah umum misalnya diberikan format penilaian dari 0-100 sementara di jurusan mereka sendiri masih memakai

format penilaian 1-4. Perbedaan ini dikarenakan pedoman akademik kurang tersosialisasikan di jurusan sehingga banyak aturan-aturan yang ada di buku pedoman tersebut tidak dipahami oleh dosen dan mahasiswa.

**d. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Bidang Akademik**

Adapun SOP yang menjadi fokus evaluasi adalah di bidang akademik. Oleh karena itu akan diuraikan tentang SOP akademik yang merupakan panduan dalam pelaksanaan kegiatan UNG di bidang akademik. SOP tersebut antara lain: 1) kepenasehatan akademik, 2) perkuliahan dan praktikum, 3) UTS dan UAS, 4) bimbingan tugas akhir mahasiswa, 5) manual daftar ulang mahasiswa, 6) bimbingan dan konseling, 7) laboratorium, 8) ujian sarjana, 9) perpustakaan, 10) pusat PPL UNG, 11) KKN/KKS, 12) lembaga penelitian, 13) lembaga pengabdian masyarakat, 14) pusat peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional (P3AI), 15) *monitoring* dan

evaluasi, 16) jaringan informasi dan komunikasi kelembagaan, 17) pusat sumber belajar.

Dari hasil evaluasi terhadap SOP ini sudah baik dan sebagian besar sudah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kajur/kaprodi. Namun seperti juga renstra dan pedoman akademik, SOP ini juga belum disosialisasikan sepenuhnya oleh pihak BPM-PT. Oleh karena itu, pihak BPM-PT seperti yang disampaikan kepada penulis lewat wawancara mengungkapkan, bahwa sekarang mereka menggandakan/memfotokopi SOP tersebut dan diberikan kepada jurusan-jurusan. Hal ini dilakukan karena adanya program-program yang dibuat oleh BPM-PT sekarang yang terkait dengan *monitoring* perkuliahan, audit mutu pembelajaran, dan sebagainya. Inilah beberapa hal yang merupakan hasil evaluasi terhadap visi misi dan jenis-jenis kebijakan yang dibuat oleh UNG.

2. Simpulan Hasil Evaluasi Konteks

Pada visi UNG menunjukkan pandangan bahwa UNG sebagai perguruan tinggi yang menjadi pioner dalam pengembangan peradaban. Hal ini juga dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Visi ini pun menunjukkan pandangan UNG untuk menyatu dalam masyarakat, karena diharapkan oleh seluruh *civitas academica* dapat mengaktualisasikan diri dalam pengembangan peradaban, bukan saja untuk *civitas* dan lulusannya tetapi juga bagi masyarakat.

Visi ini seharusnya disosialisasikan kepada seluruh warga kampus agar semua dapat mengetahui, memahami dan dapat direalisasikan melalui misi UNG. Sepanjang pengamatan, visi dan misi UNG sudah disosialisasikan, namun belum sepenuhnya. Hal ini karena hanya terbatas pada pimpinan saja. Sementara dosen dan mahasiswa hanya mengikuti arus dalam melaksanakan kegiatan yang sudah diprogramkan.

Berdasarkan uraian pada hasil evaluasi konteks di atas, objektifnya visi dan misi UNG haruslah

dijawantahkan ke dalam visi dan misi yang ada di fakultas. Namun sesuai temuan, terdapat kesamaan persepsi dalam merumuskan visi dan misi di beberapa jurusan. Sementara di jurusan lain tidak demikian. Dalam hal ini, jurusan lain tersebut lebih menekankan pada kompetensi bidang keahliannya dengan tidak menambahkan tentang pengembangan moral bagi mahasiswa.

Adapun tentang jenis-jenis kebijakan yaitu renstra dan SOP, statusnya sama dengan visi dan misi di atas, yaitu sudah disosialisasikan. Namun, setelah ditanyakan kepada kajur/kaprodi dan pihak BPM-PT sebagian menjawab apa adanya tentang apa saja yang dibahas dalam renstra dan SOP tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa renstra dan SOP yang telah dibuat belum sepenuhnya diketahui oleh kajur/kaprodi dan pihak penjaminan mutu apalagi bagi dosen dan mahasiswa. Jika tidak diketahui maka sangat sukar untuk dipahami. Oleh karena itu, pihak pimpinan UNG harus mangantisipasi dengan mengadakan sosialisasi kembali mengenai visi misi dan berbagai kebijakan

berupa renstra dan SOP. Hal ini dilakukan melalui jurusan/prodi masing-masing agar lebih dipahami makna kebijakan tersebut.

Demikian pula visi misi dan renstra serta kebijakan tentang penjaminan mutu akademik. Dalam dokumen tentang laporan kegiatan, ditemukan sosialisasi setiap program/kebijakan penjaminan mutu akademik sudah dilaksanakan. Namun, karena kepemimpinan yang masih baru, belum mengetahui apakah semua itu sudah dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu, alangkah baiknya setiap pergantian pimpinan pada BPM-PT dan BPM-PI, pimpinan lama harus melaporkan hasil kinerjanya. Hal ini terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang belum terlaksana. Sehingga pimpinan yang baru dapat mengetahui dimana letak kepemimpinan baru akan akan memulai pekerjaannya. Tidak lain hal ini agar pekerjaan bisa berkelanjutan.

Pedoman akademik dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan akademik baik di Universitas maupun di jurusan/prodi. Temuan

penulis, bahwa sama halnya dengan kebijakan yang lain pedoman akademik pun kurang tersosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari ketidaktahuan prosedur tentang apa yang dituangkan dalam pedoman akademik, antara lain: tentang kalender akademik, sistem penyelenggaraan akademik, layanan universitas, etika kehidupan akademik, kemahasiswaan dan lain sebagainya.

B. Komparasi Hasil Evaluasi Masukan dengan Kebijakan Penjaminan Mutu Akademik

1. Hasil Evaluasi Masukan (*Input*)

Evaluasi masukan (input) merupakan suatu hal yang harus ada dan merupakan persyaratan utama dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik. Aspek-aspek yang merupakan indikator dalam melaksanakan evaluasi masukan (input) ini antara lain: a) ketersediaan sumber daya manusia yaitu dosen dan tenaga penunjang akademik, b) ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan perkuliahan (ruang kuliah, laboratorium, IT), c) kurikulum, d) rekrutmen

mahasiswa, e) rekrutmen dosen, f) adanya anggaran/dana yang disiapkan.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan misi dan mewujudkan visinya, pada akhir tahun 2010 UNG telah memiliki sumber daya manusia yang andal sehingga memiliki kemampuan dalam meningkatkan mutu akademik maupun non akademik. Indikator ini dapat dilihat dari kualifikasi pendidikan dan profesi dosen seperti: persentase dosen berpendidikan S2 dan S3, jumlah guru besar, dan jumlah dosen yang tersertifikasi. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kualifikasi dosen UNG telah memenuhi syarat seperti yang disyaratkan dalam UU nomor 14 Tahun 2005, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu di setiap jurusan tidak ada lagi dosen S1 yang memberikan kuliah. Hal ini membuat para dosen muda S1 berupaya menyelesaikan studinya di program S2 baik di dalam maupun di luar negeri.

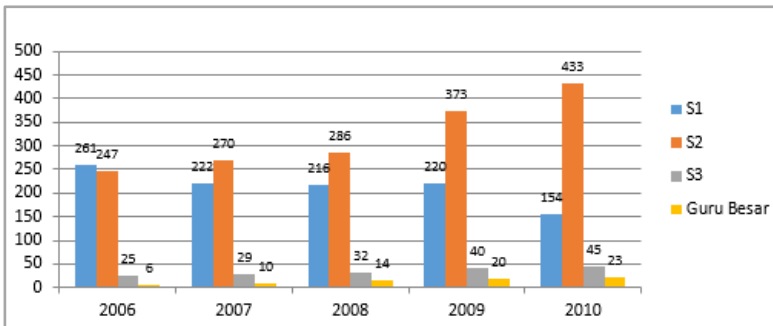
Dilihat dari rasio dosen dengan mahasiswa, ada beberapa jurusan yang dievaluasi. Perbandingan rasio antara dosen dan mahasiswa masih rendah, dalam arti angka perbandingan antara dosen dengan mahasiswa melebihi rasio normal. Hal ini disebabkan mahasiswa di jurusan tersebut banyak, sementara jumlah dosen hanya sedikit. Tidak lain karena sebagian dosen melanjutkan studi S2 dan S3 di luar daerah.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa di beberapa jurusan mempunyai dosen yang kompetensi atau latar belakang ilmu/keahliannya tidak sesuai dengan jurusannya. Hal ini disebabkan susahya memperoleh calon dosen yang sesuai dengan kompetensinya di jurusan tersebut. Hal ini pun sesuai dengan hasil temuan yang terdapat di dua jurusan yaitu di jurusan teknologi perikanan dan teknologi industri.

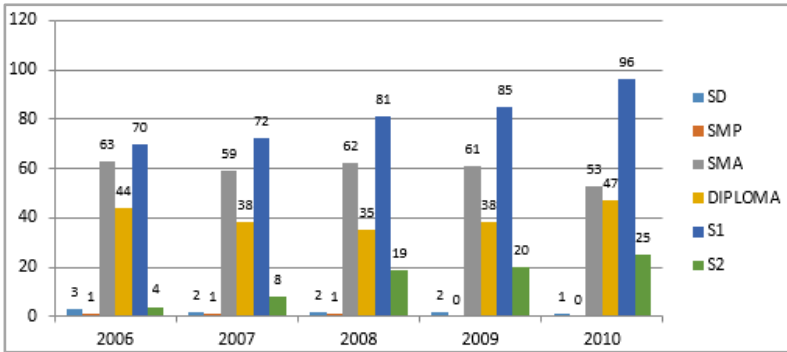
Demikian pula dengan pegawai/tenaga penunjang akademik telah memiliki kemampuan

profesional di bidang pengelolaan administrasi akademik, keuangan, dan sebagian besar sudah berstrata S1 bahkan sampai S2. Hal ini menunjukkan bahwa di bidang sumber daya manusia, UNG terevaluasi sudah memenuhi standar. Hanya saja dalam bidang IT sumber daya tersebut masih kurang.

Berikut adalah data tentang perkembangan jumlah dosen menurut pendidikan serta keadaan guru besar tersaji pada gambar 5.1 dan jumlah pegawai menurut pendidikan pada gambar 5.2.



Gambar 5.1
Perkembangan Jumlah Dosen UNG Tahun 2006-2010



Gambar 5.2
Perkembangan Jumlah Pegawai UNG Tahun 2006-2010

b. Sarana Prasarana Penunjang Akademik

Keadaan sarana dan prasarana UNG terus ditingkatkan dalam meningkatkan kualitas layanan sehingga memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sarana penunjang akademik yang dievaluasi meliputi: ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, media, IT, dan sebagainya. Untuk ruang kuliah, sesuai dengan hasil evaluasi masih kurang. Hal ini karena mahasiswa UNG sekarang, hampir di setiap jurusan/prodi memiliki kelas paralel sampai 3 (tiga) kelas. Tentu saja hal ini sangat membebani karena ruang kelas yang tidak cukup juga tidak dilengkapi oleh media dan IT.

Pelaksanaan perkuliahan pun tidak berjalan lancar, dosen sering memindahkan jam kuliah karena tidak adanya ruangan apalagi tentang tersedianya media perkuliahan seperti LCD. Bahkan setiap kali akan digunakan, media tersebut menjadi rebutan bagi dosen yang mempunyai kepentingan yang sama untuk mengajar.

Terkait dengan sarana prasarana ini, sudah mulai ada pembenahan karena merupakan komitmen atau program pengembangan oleh pimpinan saat ini. Seperti yang dapat dilihat sekarang, gedung kuliah pada beberapa fakultas sementara dibangun dengan kapasitas yang lebih besar dan berbasis IT.

Di sisi lain, kuota mahasiswa baru yang akan diterima, akan dirasionalkan dengan ketersediaan sarana yang ada. Demikian juga dengan perpustakaan baik di jurusan, fakultas, maupun di universitas belum begitu lengkap dan pengelolaannya masih manual dan belum memakai komputerisasi.

Setelah mengadakan observasi dan wawancara dengan kajar/kaprodi, untuk fasilitas laboratorium nyatanya masih kurang. Rata-rata masih menggunakan laboratorium terpadu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama beberapa kajar. Bahkan nilai akreditasi jurusan yang rendah dikarenakan laboratorium dan peralatannya yang masih sangat kurang. Berikut akan diuraikan dalam tabel tentang sarana dan prasarana yang ada di UNG.

Tabel 5.1 Luas Bangunan Masing-Masing Fakultas

NO	NAMA UNIT	FAKULTAS		
		Ruang Kuliah (m ²)	Perkantoran (m ²)	Laboratorium (m ²)
1.	Fakultas Ilmu Pendidikan	2.168	2.450	1.989
2.	Fakultas Ilmu Sosial	1.435	2,999	-
3.	Fakultas MIPA	5.199	964	2.353
4.	Fakultas Teknik	5.109	1.482	1.882
5.	Fakultas Sastra dan Budaya	850	1.528	1.674
6.	Fakultas Pertanian	425	302	807
7.	Fakultas IKK	425	302	807
8.	Fakultas Ekonomi	1.225	150	546

9.	Program Pascasarjana	975	325	-
----	----------------------	-----	-----	---

Tabel 5.2 Luas Bangunan Fasilitas Penunjang

NO.	NAMA GEDUNG	LUAS (m²)
1.	Gedung Rektorat	3.672
2.	Gedung Pusat Kebudayaan	747
3.	Gedung Perlengkapan	354
4.	Gedung Serba Guna	1,257
5.	Gedung LPM	352
6.	Gedung Lembaga Penelitian	290
7.	Gedung UPT Pusat Komputer	494
8.	Gedung Biro Akademik	360
9.	Gedung Civika	296
10.	Gedung Perpustakaan	1.956
11.	Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa	1,682
12.	Gedung Pusat Study Luar Negeri	243
13.	Gedung LP3	794
14.	Gedung Darma Wanita	297
15.	Gedung Kafetaria	27
16.	Pos Menwa	155
17.	Pos Satpam	74
18.	Panggung Permanen	73
19.	Gedung Percetakan	283
20.	Gedung HMJ	40
21.	Gedung Lapangan Olahraga Tertutup	132
22.	Mushola	79
23.	Rumah Adat	175
24.	Gedung Aula Lama dan Aula Kampus III	645
25.	Rumah Dinas Dosen / Pegawai	2.522

26.	Gedung Pelayanan Umum	300
27.	Gedung Kopma dan Koperasi Dosen / Pegawai	200
28.	Tribun Lapangan Sepak Bola, Basket, dan Tenis	343
29.	Lapangan Sepak Bola	15,000
30.	Lapangan Tenis Kampus I, Kampus III	3,500
31.	Lapangan Basket	1,500
32.	Bangunan Ruang Ganti Lap. Tenis	11
33.	Selasar Penghubung Antar Gedung	200
34.	Areal Parkir	750

c. Kurikulum

Kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin mutu kompetensi sesuai dengan jurusan/program studi yang ditempuh. Selain itu juga harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas diri.

Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan proporsional antara mata kuliah pengembangan kepribadian, mata kuliah keilmuan/keterampilan, mata kuliah perilaku berkarya, dan mata kuliah berkehidupan

bermasyarakat. Proses penyusunan kurikulum berbasis kompetensi yang meliputi profil lulusan, kompetensi lulusan, bahan kajian, kedalaman, dan keluasan kajian (SKS), distribusi ke dalam mata kuliah, rancangan pembelajaran, dan metode pembelajaran.

Adapun evaluasi dan pemutakhiran kurikulum terkait dengan bagaimana pelaksanaan *review* kurikulum untuk setiap jurusan/prodi dilakukan secara berkala minimal 3 tahun sekali. Hal ini melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) seperti pemakai lulusan, alumni, pihak yang berminat, dan masyarakat pada umumnya, serta mahasiswa. Untuk pelaksanaan pemutakhiran (*review*) kurikulum di UNG ini, memang pelaksanaannya tetap yaitu 3 tahun sekali. Akan tetapi ironisnya, dalam pelaksanaannya ada beberapa jurusan yang tidak mengundang *stakeholders*, alumni, mahasiswa apalagi masyarakat. Sehingga hasil yang diharapkan yaitu terwujudnya kurikulum yang sesuai dengan kompetensi tidak akan

terwujud. Oleh karena itu, *review* kurikulum akan diadakan 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi kurikulum tersebut dilaksanakan bertujuan untuk: merespon perkembangan iptek, merespon perubahan sosial di luar sistem pendidikan, memenuhi kebutuhan mahasiswa, dan merespon perubahan sistem pendidikan. Inilah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan kurikulum.

d. Rekrutmen Mahasiswa

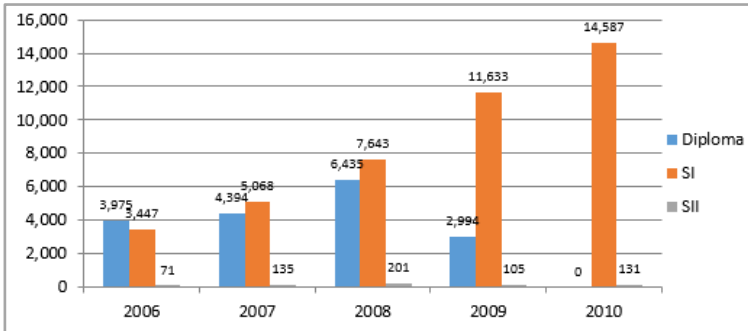
Kebijakan tentang rekrutmen mahasiswa harus sesuai dengan pedoman rekrutmen yang berisikan persyaratan. Hal ini harus dipenuhi oleh calon mahasiswa untuk dapat diterima dalam suatu prodi. Hal lain yang harus diperhatikan dalam rekrutmen mahasiswa ini adalah keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru yaitu persyaratan akademik dan dokumentasi penerimaan serta sistem penerimaan mahasiswa dari golongan tidak mampu atau cacat fisik dan penerapan prinsip pemerataan daerah SMA asal mahasiswa.

Pelaksanaan rekrutmen mahasiswa di UNG dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Dari hasil evaluasi, diperoleh informasi bahwa rekrutmen calon mahasiswa ditempuh dengan 3 cara antara lain: lewat jalur undangan, SMPTN, dan lokal. Jalur undangan diadakan dengan terlebih dulu pihak UNG mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Gorontalo. Rekrutmen jalur undangan ini mempunyai persyaratan antara lain: berprestasi dan berekonomi lemah, walaupun hasilnya masih diadakan pemeringkatan terlebih dahulu untuk bisa diterima. Untuk jalur SMPTN ini, pelaksanaannya sama dan secara serentak untuk seluruh Indonesia, demikian juga persyaratannya. Dari hasil wawancara dengan penanggung jawab bidang akademik, bahwa jalur lokal akan dibuka apabila target yang ditempuh tentang jumlah mahasiswa tidak terpenuhi, dan pelaksanaannya tentang kuota

(daya tampung) di jurusan harus dikoordinasikan dengan kajur/prodi. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kapasitas jumlah dosen dan jumlah ruang kuliah yang tersedia. Di salah satu jurusan sesuai wawancara peneliti dengan kajur, pernah ditolak 19 orang mahasiswa yang sudah direkrut secara lokal karena melebihi kuota dan ini merupakan hal yang pertama dilakukan karena beliau ingin mengejar kualitas daripada kuantitas.

Terkait dengan rekrutmen mahasiswa, nantinya akan lebih diperketat dan akan mengurangi jumlah mahasiswa. Hal ini berkaitan dengan semakin banyak mahasiswa yang diterima ternyata berimbas pada pengeluhan dosen yang tidak mampu lagi mengajar dan masing-masing jurusan membuka kelas paralel apalagi untuk dosen pengampu mata kuliah umum seperti PKn, agama, IBD, Bahasa Inggris, dan lainnya. Berikut akan

digambarkan jumlah mahasiswa yang terdaftar di UNG periode 2006-2010.



Gambar 5.3
Perkembangan Jumlah Mahasiswa Terdaftar di UNG
Tahun 2006-2010

e. Rekrutmen Dosen

Rekrutmen dosen di UNG dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum yang dalam proses rekrutmen melibatkan jurusan/prodi. Sistem rekrutmen dan pengembangan dosen harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kompetensi, kualifikasi, dan jenjang pendidikan.

Dalam melakukan rekrutmen dosen, objektifnya harus dikaji terlebih dahulu kompetensi apa yang masih kurang antara dosen atau tenaga pengajarnya. Kemudian diadakan pemetaan, tapi semua data didapatkan dari jurusan karena jurusan/prodi yang lebih mengetahui kebutuhan dosen dan kompetensi keahlian yang dibutuhkan. Hasil evaluasi input di beberapa kajur/kaprodi ternyata ada juga dosen yang direkrut tanpa sepengetahuan kajur/kaprodi bahkan dekan. Bahkan yang lebih tragis lagi, dosen yang direkrut tersebut tidak dibutuhkan lagi jurusannya karena sudah melebihi kuota, sedangkan dosen yang dibutuhkan keahliannya sesuai dengan jurusan malah tidak direkrut. Inilah beberapa hal terkait evaluasi input pada rekrutmen dosen.

f. Ketersediaan Anggaran/Dana

Strategi kebijakan pembiayaan/dana merupakan bagian penting dari rangkaian keberhasilan program/kebijakan UNG. Strategi ini meliputi kebijakan penganggaran,

perencanaan penggunaan dana, pelaksanaan dan pengawasan evaluasi penggunaan dana. Kebijakan anggaran/dana UNG menyangkut penggunaan anggaran pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pendidikan tinggi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri pendidikan nasional.

Meskipun kemampuan di UNG telah mulai tumbuh untuk menggali sumber dana di luar alokasi anggaran dari Kementerian Pendidikan Nasional, namun sifatnya masih relatif kecil dibandingkan dengan anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan. Di samping itu, besar dan keteraturannya masih terlalu sulit diperkirakan untuk dapat dijadikan unsur yang pasti dalam penyusunan kebijakan umum anggaran pengelolaan UNG.

Disadari sepenuhnya bahwa kemampuan dalam menggali sumber-sumber dana di luar alokasi anggaran dari pemerintah merupakan dampak jangka panjang untuk pembiayaan pendidikan di UNG. Namun demikian, ke depan

UNG harus mampu melakukan penggalan dana dari luar alokasi dana pemerintah, mengingat dengan sistem pendidikan tinggi yang makin diarahkan pada kemandirian. Sampai sekarang sebagian dana di luar anggaran pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan UNG diperoleh dari masyarakat dalam bentuk sumbangan penunjang pendidikan (SPP) yang dibayar mahasiswa.

Berkenaan dengan itu, agar mahasiswa tidak dibebani biaya kegiatan yang tidak memberi sumbangan langsung pada pendidikannya, maka kebijakan UNG dalam menggali potensi sumber dana perlu dicurahkan pada kegiatan di berbagai bentuk pelatihan, akademik, penelitian terapan serta layanan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mewakili PR2 dan dokumen yang peneliti dapatkan dari renstra UNG 2006-2010, bahwa lebih diarahkan pada pendekatan ideal berapa besar

anggaran yang diperoleh, dan berapa besar jumlah yang dibutuhkan serta seberapa besar manfaat anggaran untuk membiayai berbagai program/kebijakan UNG lima tahun ke depan. Dalam rangka itulah, maka rencana pembiayaan diarahkan pada hal-hal berikut.

- a. Pembiayaan penataan system kelembagaan UNG
- b. Pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana akademik dan penunjang akademik.
- c. Pembiayaan kegiatan penelitian dosen, pendidikan dan pengajaran serta pengabdian pada masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel.
- d. Pembiayaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya yang memfokuskan pada pencapaian visi dan misi UNG.

2. Simpulan Hasil Evaluasi Input

Hasil temuan peneliti pada evaluasi masukan (input) yang terbagi pada enam fokus evaluasi yaitu:

sumberdaya pelaksana dan pendukung, ketersediaan sarana prasarana, kurikulum, rekrutmen mahasiswa, rekrutmen dosen, dan tersedianya anggaran/dana khusus peningkatan penjaminan mutu akademik di UNG.

Terkait dengan komponen sumberdaya pelaksana dan pendukung yaitu kualitas dosen dan pegawai dalam kapasitasnya sebagai tenaga pengajar dan tenaga administrasi. Objektifnya dosen harus memenuhi kualifikasi yaitu berstrata S2, sedangkan pegawai objektifnya berstrata S1. Rata-rata dosen sudah memenuhi kualifikasi S2 dan S3. Bahkan sudah ada yang berpangkat profesor sedangkan pegawai belum semuanya dalam jenjang S1 karena masih ada lulusan SMA dan Diploma. Namun masih ada pula dosen yang sudah S2 dan ada yang sementara menempuh studi S3. Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi dosen dan pegawai sudah baik dan memenuhi kriteria sesuai dengan bidangnya.

Hasil temuan peneliti lewat dokumen laporan auditor tentang pelaksanaan pembelajaran yang ada

di BPM-PI, walaupun dosen dan pegawai telah memenuhi kualifikasi, namun mutu dalam melaksanakan pembelajaran masih kurang. Terlebih padadosen yang bukan lulusan studi pendidikan. Hal ini berdampak pada pengetahuan dan pemahaman terhadap apa yang disampaikan pada saat pembelajaran berlangsung.

Oleh karena itu, para dosen harus dibekali dengan ilmu mendidik dan bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media dan metode sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Seperti yang ditemukan pada salah satu jurusan, terdapat beberapa dosen yang menjadi tenaga pengajar tidak sesuai dengan kompetensinya. Ironisnya, dosen tersebut menjabat sebagai ketua jurusan. Ketika dilakukan verifikasi kepada dosen yang bersangkutan, jawabannya karena jurusan tersebut memang kekurangan tenaga dosen yang sesuai dengan kompetensinya. Hal ini tidak lain karena lulusan dari jurusan tersebut begitu langka. Ini menunjukkan bahwa sebelum membuka suatu jurusan baru, hal yang perlu menjadi perhatian

adalah kesiapan para dosen yang menjadi tenaga pengajaran kesesuaian dosen tersebut dengan kualifikasi bidang yang akan diajarkan.

Sementara itu, hasil observasi peneliti terhadap sarana prasarana di setiap jurusan yang dipilih peneliti untuk diwawancarai rata-rata masih sangat minim. Sarana prasarana tersebut antara lain berupa ruang kuliah, media pembelajaran/LCD, laboratorium, IT, perpustakaan jurusan dan lain sebagainya. Objektifnya UNG dengan kapasitas mahasiswa yang begitu banyak harus ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai. Ironisnya ada jurusan yang tidak memiliki laboratorium. Di salah satu jurusan justru menyebabkan nilai akreditasi turun hanya karena laboratorium yang fasilitasnya tidak memenuhi kriteria.

Untuk ruang kuliah masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh mahasiswa yang begitu banyak masuk ke UNG dan hampir setiap jurusan menerima 3 kelas. Ini membuat mahasiswa tidak bisa tertampung secara utuh di dalam ruang kuliah. Terlebih lagi jika setiap kelas bisa mencapai 30-40

orang. Kenyataan yang ada sekarang, pembangunan ruang kuliah baru sementara dilakukan. Hal ini terjadi semenjak pergantian kepemimpinan yang baru. Gedung kuliah tersebut dibangun hingga tiga lantai. Sehingga bisa meminimalisir kekurangan ruang kuliah.

Demikian pula untuk IT, diharapkan efektivitas dan efisiensi layanan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat berbasis teknologi informasi. Berdasarkan temuan yang dilakukan peneliti, penggunaan dan pemanfaatan IT khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran masih kurang. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan pemahaman dan penerapan teknologi canggih seperti *E-learning* dan internet yang masih terbatas. Pada akhirnya berakibat pada kurang efektifnya penggunaan IT.

Kurikulum objektifnya harus di *review* setiap 2 tahun sekali. Pelaksanaannya harus memenuhi kriteria, antara lain harus mengundang *stakeholder*, alumni, dan pakar di bidang kurikulum sesuai dengan kompetensi jurusan. Akan tetapi, masih ada

jurusan yang membuat *review*/lokakarya kurikulum dengan tidak mengundang *stakeholder*, pakar, dan alumni. Bahkan ada mata kuliah yang sembarangan diganti dan tidak melihat *basic* jurusan khususnya pada bidang pendidikan.

Rekrutmen dosen dan mahasiswa seyogyanya memperhatikan kebutuhan dari segi kapasitasnya dan segi keahliannya. Pada kenyataannya, ada dosen yang diangkat di suatu jurusan walaupun di jurusan tersebut tidak menerima dosen yang kualifikasinya tidak dibutuhkan lagi di jurusan tersebut. Hal yang mengejutkan lagi adalah dekan dan kajur/kaprodi tidak memasukkan nama dosen tersebut dalam rekomendasi namun tiba-tiba dinyatakan lulus. Akhirnya, kapasitas dosen di jurusan tersebut menumpuk di salah satu kompetensi sedangkan kompetensi lain masih kurang.

Pada bagian rekrutmen mahasiswa, dalam penerimaan ke depan harus lebih diperketat dan dibatasi. Hal ini disebabkan karena daya tampung di UNG tinggal sedikit dan sarana prasarana yang minim, terlebih ditambah dengan ruang kuliah yang

tengah dibenahi. Rekrutmen mahasiswa di tahun mendatang akan dikurangi karena Rektor dan PR1 lebih menitikberatkan kepada kualitas dibanding kuantitas.

Untuk ketersediaan dana, objektifnya harus memberikan porsi yang sesuai dengan kebutuhan khususnya di BPM-PI dan jurusan/prodi yang lebih banyak melaksanakan kebijakan penjaminan mutu akademik. Hasil temuan peneliti didukung pernyataan dari kepala BPM-PT tentang adanya dana yang minim sehingga banyak program yang telah dibuat oleh jurusan terkait dengan penjaminan mutu akademik tidak terlaksana. Seharusnya BPM-PT dan jurusan harus diberikan porsi dana yang besar, karena mutu tersebut semuanya bersumber dari jurusan dan BPM-PT sebagai suatu badan yang melaksanakan jaminan terhadap mutu tersebut.

C. Komparasi Hasil Evaluasi Proses dengan Kebijakan Penjaminan Mutu Akademik

1. Hasil Evaluasi Proses (*Process*)

Pada hasil evaluasi proses ini yang akan dibahas adalah evaluasi pelaksanaan kebijakan penjaminan

mutu akademik yang berupa: 1) pelaksanaan perkuliahan dan praktikum, 2) UTS dan UAS, 3) bimbingan tugas akhir mahasiswa (makalah, skripsi, dan tesis), 4) ujian sarjana, dan 5) *monitoring* evaluasi. Kebijakan ini akan diuraikan bagaimana implementasinya sehingga kita bisa mengukur sudah sampai dimana pelaksanaannya.

a. Perkuliahan dan Praktikum

Perkuliahan adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang dijadwalkan. Demikian juga dengan praktikum tetapi lebih menekankan pada aspek psikomotorik (keterampilan), afektif (sikap) dan kognitif (pengetahuan) dengan menggunakan peralatan di laboratorium (studio, kebun percobaan, bengkel) yang dijadwalkan.

Deskripsi tentang perkuliahan dan praktikum selain didapatkan dari dokumen, juga didapatkan dari wawancara melalui pertanyaan yang disampaikan kepada kajar/kaprodi yang berbunyi “bagaimana

pelaksanaan perkuliahan dan praktikum di jurusan anda?” Sebagian besar kajar/kaprodi menyatakan bahwa pelaksanaan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan sebagaimana mestinya, walaupun kadang sedikit terlambat setiap kali dimulai. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam penyusunan jadwal oleh jurusan.

Adapun perkuliahan di UNG dilaksanakan dalam bentuk: 1) perkuliahan reguler: dalam satu tahun akademik, penyelenggaraan perkuliahan reguler dibagi menjadi dua semester (ganjil dan genap), 2) perkuliahan alih semester yang dilaksanakan diantara dua semester. Kedua jenis perkuliahan ini diatur dalam kalender akademik yang ditetapkan oleh rektor.

Prosedur pelaksanaan perkuliahan dan praktikum yaitu: 1) diawali dengan BAK dan pimpinan jurusan menyiapkan jadwal perkuliahan dan praktikum yang disahkan dengan keputusan rektor satu bulan sebelum

penyusunan rencana studi mahasiswa, 2) tim pengajar mengadakan pertemuan persiapan perkuliahan yang meliputi pembahasan silabus, SAP, kontrak perkuliahan dan bahan ajar sebelum semester dimulai, 3) tim pengajar menerima daftar peserta kuliah dari BAK melalui jurusan/prodi selambat-lambatnya pada hari pertama perkuliahan, 4) tim pengajar menyusun pembagian kelompok praktikum dan mengumumkannya kepada peserta praktikum pada praktikum pertama.

Pada pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan hasil wawancara sebagian kajar/kaprodi dan mahasiswa melalui angket *monitoring* evaluasi perkuliahan dari BPM-PI menyatakan bahwa rata-rata dosen melaksanakan kegiatan perkuliahan dan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Perkuliahan minimal 14 kali pertemuan dalam satu semester. Pada awal pertemuan dosen menyampaikan kontrak perkuliahan termasuk silabus, SAP, dan bahan

ajar, dosen menyampaikan materi kuliah sesuai dengan SAP dan silabus. Setelah itu, mahasiswa menandatangani daftar hadir, dosen mengisi berita acara perkuliahan dan melakukan verifikasi daftar hadir, kemudian menyerahkan berita acara pelaksanaan perkuliahan dan daftar hadir ke tata usaha jurusan/prodi.

Mengenai kehadiran dosen dalam melaksanakan perkuliahan, sebagian kajar/prodi menyatakan tidak semua dosen melaksanakan hal tersebut sesuai dengan ketentuan. Hal ini karena di beberapa jurusan sebagian dosen mengikuti S3 sehingga sering tidak berada di tempat.

b. UTS dan UAS

Ujian Tengah Semester adalah ujian yang diselenggarakan pada pertengahan semester, sedangkan Ujian Akhir Semester adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir semester setelah perkuliahan dan praktikum selesai dilaksanakan. UTS dan UAS dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis, *take*

home, ujian lisan, dan tes perbuatan/tindakan. Dalam pelaksanaan UTS dan UAS, sesuai dengan pernyataan kajur/kaprodi dan mahasiswa melalui wawancara pelaksanaan UTS dan UAS yang dilakukan di jurusan, sebagian besar pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Namun, ada juga dosen yang terlambat memberikan UTS dan UAS, bahkan dalam memasukkan nilaipun terlambat dan hal ini akan berimbas pada pengurusan KHS dan KRS.

Adapun jenis tes UTS dan UAS menurut kajur/kaprodi yang dibenarkan oleh mahasiswa adalah beragam, ada yang melakukan tes ujian lisan ada juga test tulisan dan penugasan tergantung pada dosen pengampu mata kuliahnya. Bagi mahasiswa yang berhalangan hadir dalam mengikuti UTS dan UAS akan mengikuti ujian susulan dengan batas waktu yang ditentukan (1 minggu setelah ujian). Jika lewat waktunya, maka ujian susulan tersebut tidak akan dilayani karena akan mengganggu

administrasi pemasukan nilai ke jurusan. Bagi dosen yang terlambat memasukkan nilai maka akan diberlakukan aturan, pihak jurusan akan mengambil alih dan memberikan nilai kepada mahasiswa. Keputusan ini tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan berlaku bagi semua dosen di UNG.

c. Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa (Makalah, Skripsi, dan Tesis)

Bimbingan tugas akhir telah diatur dalam SOP yang merupakan rambu-rambu untuk dijadikan sebagai dasar atau patokan pelaksanaan bimbingan tugas akhir mahasiswa. Bimbingan ini merupakan proses bantuan yang diberikan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang akan menulis/menyusun tugas akhir. Tugas akhir adalah suatu karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa pada program studi tertentu yang merupakan pengembangan keilmuaan atau aplikasi dari keilmuan yang diperoleh selama mengikuti kuliah atau pendidikan di perguruan tinggi. Adapun bentuk tugas akhir mahasiswa meliputi makalah atau

laporan PKL bagi mahasiswa program diploma, skripsi bagi mahasiswa S1 dan tesis bagi mahasiswa S2.

Melalui wawancara dengan kajur/kaprodi bahwa bimbingan tugas akhir bertujuan sebagai pedoman bagi pelaksanaan bimbingan tugas akhir, baik bagi mahasiswa maupun dosen pembimbing agar pelaksanaan menjadi lebih efektif. Menurut aturannya, dosen pembimbing terdiri dua orang yaitu pembimbing 1 dan 2 minimal memiliki kualifikasi pendidikan S2/S3 serta memiliki pengalaman kerja sebagai dosen sekurang-kurangnya 5 tahun dengan pangkat minimal lektor kepala. Bentuk pembimbingan menurut beberapa mahasiswa alumni yaitu melalui dialog/tatap muka langsung, catatan atau koreksi langsung pada draft tugas akhir, dan melalui telepon/hp. Lamanya pembimbingan yaitu dua (2) bulan, tapi itu semua tergantung pada mahasiswa yang cepat merespon untuk segera memperbaiki coretan sesuai dengan petunjuk dosen pembimbing.

Pembimbing 1 dan 2 harus membagi pembimbingan agar lebih efektif dan efisien. Sebab biasanya antar pembimbing sering tidak sepaham dalam membimbing. Hal ini sesuai dengan wawancara kajur/kaprodi yaitu mereka juga sebagai dosen pembimbing menyatakan “Kadang yang kami sudah perbaiki diubah lagi oleh pembimbing yang lain, apalagi jika tugas akhir yang dipilih tidak disesuaikan dengan keahlian dosen, akhirnya mahasiswa yang dirugikan”.

Menurut beberapa kajur/kaprodi, sebaiknya pembimbingan disesuaikan dengan latar belakang keilmuan dari setiap dosen. Hal ini agar mahasiswa dibimbing dengan baik dan hasilnya dapat memuaskan. Jika tidak dilakukan seperti itu, maka tugas akhir mahasiswa tidak akan selesai seperti apa yang diharapkan. Akan tetapi, ada juga dosen pembimbing yang antara timnya saling berdiskusi menentukan batas yang akan dikoreksi dalam tugas akhir sehingga terdapat kesepahaman dalam membimbing.

d. Ujian Sarjana

Ujian sarjana/akhir adalah suatu bentuk ujian lisan tentang isi skripsi/tugas akhir, kemampuan mempresentasikan, menjelaskan, mempertahankan, menggunakan media dan kompetensi akademik sesuai dengan program studi di mana mahasiswa belajar. Ujian ini dilaksanakan dalam suatu sidang ujian (sidang akademik).

Menurut beberapa kajar/kaprodi dan mahasiswa alumni bahwa mahasiswa dapat mengikuti ujian sarjana jika telah memenuhi persyaratan yang menjadi prosedur dalam pelaksanaan ujian sarjana. Biasanya, lamanya studi mahasiswa adalah 4 tahun, namun ada juga yang lebih. Akan tetapi, pada tahun 2011 ada program akselerasi sehingga ada mahasiswa yang telah mengikuti ujian sarjana 3,5 tahun dan langsung diwisuda. Adapun persyaratannya antara lain:

- a. telah mengikuti seluruh mata kuliah sesuai dengan kurikulum dan telah lulus,

- b. jumlah kredit sebanyak total SKS dikurangi sks tugas akhir,
- c. telah melaksanakan seminar outline, pembimbing dan
- d. menyelesaikan draft skripsi/tugas akhir,
- e. nilai seluruh mata kuliah sudah lengkap dengan IPK $> 2,00$ dan dibuktikan dengan transkrip nilai dari jurusan/prodi,
- f. telah melunasi SPP sampai semester berjalan dan memperoleh surat persetujuan ujian sarjana dari dosen pembimbing.

Sebagian kajar/kaprodi menyatakan, dalam tata cara pelaksanaan ujian akhir sarjana sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih ada beberapa hal yang kadang tidak dilaksanakan. Hal ini antara lain, penguji yang tidak hadir dalam sidang tidak diperkenankan menguji di luar sidang ujian. Pengganti penguji dari dosen yang tidak hadir adalah penguji yang relevan yaitu penguji 2 relevan dengan penguji 2 serta penguji 3 relevan dengan penguji 4 (berlaku sebaliknya). Akan tetapi, masih ada juga penguji

yang tidak hadir dalam ruang sidang dan menguji di tempat lain. Sehingga mengurangi kekhidmatan pelaksanaan ujian. Inilah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ujian akhir mahasiswa.

e. ***Monitoring dan Evaluasi***

Dalam upaya mewujudkan pencapaian kampus sebagai pelopor peradaban dan pusat pengembangan iptek yang berkolaborasi dengan pengembangan imtaq, menjadikan tujuan *monitoring* dan evaluasi antara lain untuk mengetahui gambaran kekuatan dan kelemahan dari suatu program. Hal ini pun dapat dilakukan upaya kongkret untuk mempermantap dan memperbaiki program/kebijakan, mewujudkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemajuan program/kebijakan dan kegiatan dari unit-unit organisasi di lingkungan UNG.

Monitoring dan evaluasi sesuai hasil wawancara kajur/kaprodi dan sekretaris BPM-PT, tentang bagaimana pelaksanaan *monitoring*

dan evaluasi. Mereka menyatakan bahwa mereka mulai melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan/ pembelajaran yang bekerjasama dengan tim monev fakultas dan tim audit dari BPM-PI. Tim audit (auditor) mulai mengadakan evaluasi pembelajaran pada semester genap kemarin dengan menyebarkan angket dari Pusat Penjaminan Mutu Akademik. Angket ini di sebarakan kepada 5 (lima) orang mahasiswa di setiap jurusan/prodi untuk menjangring masukan dari mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di UNG. Angket ini menurut sekretaris BPM-PT ada 24 (dua puluh empat) item yang akan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan perkuliahan/pembelajaran oleh dosen di setiap jurusan yang ada di UNG. Jika sudah dievaluasi oleh mahasiswa kemudian hasilnya diserahkan kepada tim audit untuk kemudian dibuat laporan atas evaluasi tersebut. Sehingga dapat diketahui apa saja kekurangan dan kelebihan dari setiap dosen untuk diadakan

perbaikan selanjutnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat program/kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Adapun pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi di setiap jurusan masih terbatas pada pelaksanaan pembelajaran. Untuk program/kebijakan yang lainnya nanti akan dibuat format/angket penilaian. Misalnya untuk kegiatan praktikum, PKL, dan sebagainya. Sesuai hasil observasi dan wawancara dengan sekretaris BPM-PI, pelaksanaan evaluasi pada program/kebijakan penjaminan mutu oleh BPM-PT sudah dilaksanakan. Akan tetapi hanya berupa laporan pelaksanaan dari beberapa kegiatan antara lain: *good practice*, lokakarya manajemen kendali mutu melalui model PDCA/SDCA, sosialisasi SOP, dan lain sebagainya, tetapi belum sepenuhnya dan secara berkelanjutan.

2. Simpulan Hasil Evaluasi Proses

Hasil investigasi pada penelitian evaluasi proses terbagi pada evaluasi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu akademik yang berupa: pelaksanaan perkuliahan dan praktikum, UTS dan UAS, bimbingan tugas akhir mahasiswa (makalah, Skripsi, dan tesis), ujian sarjana dan *monitoring* evaluasi menetapkan keputusan evaluasi aspek proses masih perlu perbaikan.

Dalam perkuliahan dan praktikum, objektifnya dimulai sesuai dengan kalender akademik yang ada di universitas. Namun sesuai data yang didapatkan oleh auditor pada saat melihat daftar *monitoring* dan evaluasi perkuliahan sekaligus dengan absensi kehadiran mahasiswa, ternyata ada dosen yang tepat waktu memulai perkuliahan bahkan sudah tiga kali pertemuan. Namun ada pula dosen yang belum memulai perkuliahan. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan praktikum di beberapa jurusan, dilaksanakan tepat pada waktunya khususnya di jurusan MIPA. Namun di jurusan lain

pelaksanaannya sering terlambat karena menyesuaikan dengan dana yang ada di fakultas.

Temuan evaluasi proses pelaksanaan UTS dan UAS dari hasil wawancara ternyata tidak serentak, khususnya UTS. Hal ini diakibatkan karena sering terlambatnya dosen memulai perkuliahan. Objektifnya pelaksanaan UTS dan UAS harus serentak terutama UAS. Hal ini agar memudahkan dalam pemasukan nilai sehingga tidak terlambat. Jika terlambat memasukkan nilai, maka konsekuensinya mahasiswa pun akan terlambat mengurus KHS dan KRS. Seusai temuan di lapangan, terungkap dari kajar/kaprodi ternyata di beberapa jurusan tidak melaksanakan yudisium. Ini membuat tidak adanya target yang sesuai dengan kalender akademik kapan akan berakhir semester yang ditandai dengan pelaksanaan UAS dan yudisium.

Temuan evaluasi proses aspek bimbingan tugas akhir mahasiswa terutama dari kajar/kaprodi dan mahasiswa alumni terungkap. Sebagian dosen tidak melaksanakan pembimbingan dengan baik. Hal ini

disebabkan karena dosen yang membimbing tidak sesuai dengan kompetensinya dan juga dipengaruhi oleh pengetahuan dosen yang berbeda tentang metodologi penelitian sesuai pedoman alumninya masing-masing. Akhirnya, antara pembimbing 1 dan 2 tidak ada kesamaan persepsi dalam membimbing. Ironisnya karena ketakutan mahasiswa yang khawatir tidak akan dibimbing lagi, maka skripsi yang dihasilkan menjadi dua model yang berbeda. Satu skripsi sesuai dengan arahan pembimbing 1, dan skripsi lainnya sesuai dengan arahan pembimbing 2. Pada saat ujian, hal tersebut barulah terungkap. Akhirnya mahasiswa tersebut yang dirugikan.

Pada pelaksanaan ujian akhir sarjana, terinvestigasi dari mahasiswa alumni bahwa pelaksanaan ujian akhir tidaklah sama. Ada yang langsung membagi diri dan ruangan untuk menguji, dan ada pula sesuai dengan pedoman yaitu mempresentasikan terlebih dahulu kemudian ada sanggahan dan saran, serta pertanyaan dari dosen di tempat yang sama. Hal ini membuat pelaksanaan

ujian terkesan begitu sakral dan khidmat. Hasil temuan tersebut terungkap karena saat menempuh cara pertama jumlah mahasiswa banyak, sementara waktu pendaftaran wisuda yang akan segera ditutup. Kebiasaan inilah yang harus diminimalisir agar mahasiswa tidak lagi menunda-nunda waktu untuk mengikuti ujian akhir.

Temuan pada pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi khususnya di jurusan/prodi seharusnya selalu dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan. Misalnya pada akhir semester. Namun, biasanya jurusan hanya menunggu pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi oleh fakultas. Padahal objektifnya pelaksanaan *monitoring* tersebut dimulai dari jurusan, pada saat semester berjalan atau pada akhir semester. Pada akhir semester biasanya diadakan rapat, tetapi bukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik setiap semester, melainkan hanya rapat penentuan jadwal dan tim *teaching* mata kuliah untuk semester depan. Inilah yang harus diperhatikan oleh semua *civitas academica* dalam meningkatkan penjaminan mutu akademik di UNG.

D. Komparasi Hasil Evaluasi Produk dengan Kebijakan Penjaminan Mutu Akademik

1. Hasil Evaluasi Produk (*Product*)

Adapun cakupan penelitian evaluasi produk meliputi: a) hasil belajar mahasiswa/IPK, c) waktu tunggu kerja lulusan, dan d) hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Berikut penjabarannya.

a. Hasil Belajar Mahasiswa/IPK

Hasil belajar merupakan perubahan atau kemampuan baru yang diperoleh seseorang setelah melakukan perbuatan belajar. Tidak lain hal ini merupakan hasil belajar dari orang yang belajar. Hasil belajar mahasiswa dapat dilihat pada perolehan indeks prestasi kumulatif (IPK). Deskripsi tentang hasil belajar mahasiswa ini didapatkan dari informasi PR1, kajur/kaprodi, dan beberapa mahasiswa.

Pada konteks ini, sebagian kajur/kaprodi menjawab hasil belajar mahasiswa cukup baik dengan rata-rata IPKnya 3,00. Akan tetapi ada juga sebagian kajur/kaprodi menyatakan bahwa IPK mahasiswa masih berkisar pada nilai 2,75,

terutama di jurusan eksakta. Bahkan ada IPK yang di bawah dari 2, 75. IPK di bawah ini karena ada mahasiswa yang tidak memenuhi 1 (satu) kriteria kelulusan dalam mata kuliah. Antara lain karena tidak memasukkan tugas/tidak ikut UTS dan kehadiran yang tidak memenuhi 14 kali pertemuan tanpa alasan.

Dalam hasil wawancara mengenai IPK mahasiswa ini, rata-rata sudah baik karena mencapai 3,00. Namun yang diperlukan itu adalah bagaimana mereka mengimplemen-
tasikan apa yang mereka dapatkan di bangku kuliah tersebut setelah mereka lulus nanti. Untuk apa IPKnya tinggi jika mereka tidak menguasai bidang ilmu yang digeluti. Sebab ke depan nanti persaingan semakin ketat. Jadi, jika mereka tidak berusaha dan belajar dengan baik, maka mereka sendirilah yang merasakannya.

Dari hasil studi dari dokumen yang ada, IPK mahasiswa UNG sudah baik yang mencapai rata-rata 3.00. Walaupun harus diakui bahwa masih banyak yang harus dibenahi dalam

meningkatkan mutu akademik ini. Baik itu mutu dosen, pegawai administrasi, proses perkuliahan, terlebih sarana prasarana ruang kuliah, media pembelajaran, IT, dan sebagainya. Itu semua tidak mudah dicapai tanpa ada komitmen dan kerja keras diantara semua warga *civitas academica* UNG.

Dengan uraian di atas, semakin jelas bahwa disamping dosen, sarana prasarana, juga turut menentukan hasil belajar/IPK mahasiswa. Karena dengan sarana prasarana yang memadai seperti media pembelajaran, LCD dan lainnya akan lebih memberikan pemahaman terhadap materi yang akan diajarkan oleh dosen kepada mahasiswa. Sehingga hasil belajar mahasiswapun akan meningkat. IPK mahasiswa akan digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.3 Rata-rata IPK Mahasiswa S1 dan S2 UNG

No.	Jenjang	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Diploma	3,15	3,20	3,16	3,21	3,19
2.	S1	3,16	3,27	3,22	3,29	3,26
3.	S2	-	3,51	3,57	3,48	3,51

b. Waktu Tunggu Kerja Lulusan

Deskripsi waktu tunggu kerja lulusan sebagaimana hasil wawancara dengan kajur/kaprodi dan mahasiswa alumni rata-rata adalah 3 (tiga) bulan atau lebih menunggu penerimaan pegawai. Hal ini dapat penulis ketahui melalui pengumuman hasil seleksi penerimaan CPNS di koran Gorontalo Post untuk 3 (tiga) tahun terakhir ini dan dari alumni pada saat mereka akan melegalisir ijazahnya. Dari informasi yang ada, waktu tunggu kerja lulusan ini tidak begitu lama karena ada yang baru lulus dan bertepatan dengan ujian CPNS lulus dan diterima. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pembantu Rektor bidang Akademik. Ini menandakan kualitas mahasiswa kita juga baik.

c. Hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

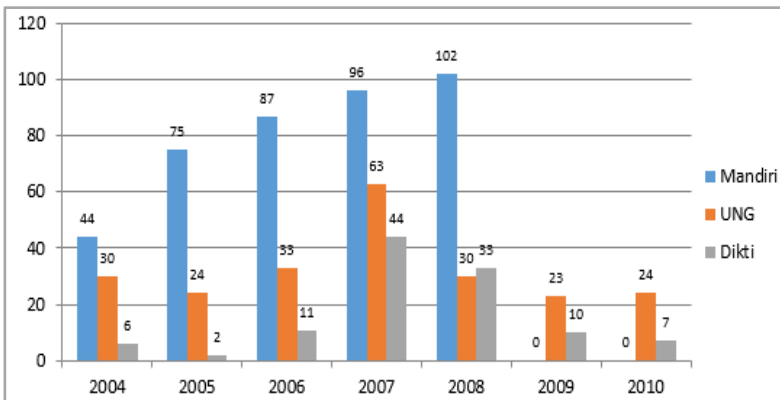
Penelitian dan pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja di bidang akademik dan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan

Tinggi UNG. Berbagai penelitian yang telah dibuat oleh dosen, baik dari hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini meliputi penelitian kerjasama dengan lembaga mitra, penelitian hibah yang didanai oleh PNPB UNG, dan penelitian Dikti yaitu hibah bersaing. Namun volume penelitian ini tidak sama pada masing-masing jurusan/prodi. Ada jurusan/prodi yang dosennya banyak melakukan penelitian, khususnya di jurusan eksakta. Sementara di jurusan lain ada pula yang jarang melakukan penelitian. Hal ini diungkapkan oleh kakur/kaprodi dan pihak lemlit disebabkan budaya meneliti tersebut belum sepenuhnya ada. Hal ini karena kesibukan masing-masing dosen dengan jam mengajar yang begitu padat. Terlebih jika mata kuliah yang diajarkannya adalah mata kuliah umum yang ada di seluruh jurusan. Sementara mata kuliah tersebut diajarkan pada hampir semua jurusan dengan kelas paralel.

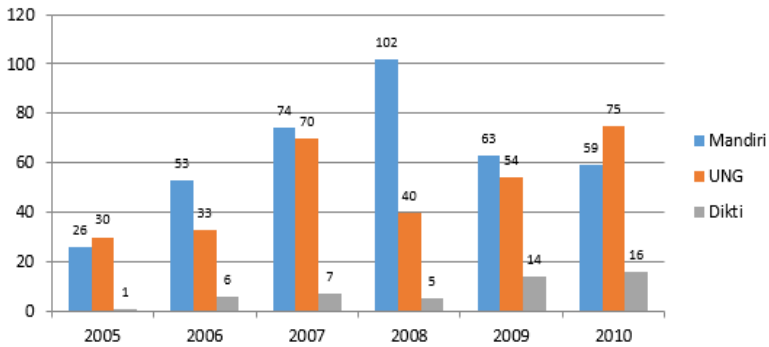
Sesuai dengan renstra UNG 2010-2015, ke depan nanti, UNG lebih mengarahkan ke arah riset yang dilakukan melalui pusat-pusat studi yang ada di Lembaga Penelitian UNG. Penelitian ini berkolaborasi dengan mahasiswa sehingga berdampak pada penguatan atmosfer akademik. Sesuai renstra, dalam peningkatan kualitas penelitian akan memberikan peluang dan peran yang lebih besar kepada jurusan. Sehingga dari jurusan tersebut akan lahir riset-riset atau program pengabdian masyarakat yang berguna bagi masyarakat. Dengan demikian, hal ini akan lebih menumbuhkan atmosfer akademik di UNG.

Sesuai data yang didapatkan dari Renstra UNG pada saat melakukan wawancara dengan PR1 dan pihak LPM, penelitian pengabdian masyarakat sudah dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa. Penelitian ini meliputi pelatihan, pelayanan masyarakat baik ekonomi maupun sosial, desa binaan, penanggulangan buta aksara, pelaksanaan wajar 9 tahun, Kuliah

Kerja Sibermas (KKS), penanggulangan bencana alam, pendampingan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen baik secara mandiri maupun dalam bentuk hibah kompetensi UNG dan Dikti menunjukkan peningkatan. Berikut akan digambarkan dalam diagram tentang jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat.



Gambar 5.4
Jumlah Penelitian yang dilakukan Dosen UNG



Gambar 5.5
Jumlah Pengabdian Masyarakat yang dilakukan Dosen UNG

Berdasarkan deskripsi hasil evaluasi tersebut di atas dan mengacu pada peningkatan penjaminan mutu itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa betapa mutu itu sangat penting ditingkatkan dalam berbagai komponen. Sehingga apa yang menjadi tujuan yang tertuang dalam setiap kebijakan dapat tercapai. Dengan demikian, masih banyak yang harus dibenahi dalam menggenjot mutu di UNG.

2. Simpulan Hasil Evaluasi Produk

Hasil investigasi pada penelitian evaluasi produk yang terbagi pada tiga (3) aspek evaluasi yaitu: hasil belajar mahasiswa/IPK, waktu tunggu kerja lulusan, dan hasil penelitian dan pengabdian

pada masyarakat, menetapkan keputusan evaluasi cukup baik. Hasil belajar mahasiswa selain bisa dilihat dari angka-angka melalui IPK, juga dapat diperhatikan pada aspek afektif dan psikomotor. Hal ini sesuai dengan pendapat Bloom bahwa bukan saja kognitif melainkan afektif dan psikomotor juga harus diperhatikan. Pada hasil temuan, domain afektif sekarang ini masih rendah. Hal ini terindikasi dari seringnya mahasiswa melakukan demo secara anarkis sehingga merugikan kampus. Objektifnya hasil belajar mahasiswa ini harus seimbang antara kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan).

Waktu tunggu kerja lulusan seperti yang diungkapkan oleh kajar/kaprodi, mahasiswa alumni dan PR1 adalah rata-rata tiga bulan ke atas. Bahkan ada yang baru menyelesaikan studi, namun sudah diterima menjadi CPNS. Sesuai dengan temuan, masih banyak mahasiswa yang belum lulus dalam seleksi CPNS. Hal ini disebabkan jurusannya tidak membuka peluang untuk menerima pegawai. Sehingga waktu tunggu kerja lulusan bukan saja

tiga bulan, bahkan sampai beberapa tahun. Artinya tidak semua alumni mahasiswa bisa cepat mendapatkan pekerjaan.

Selanjutnya hasil evaluasi produk tentang hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Berdasarkan temuan tentang hasil penelitian ini sudah cukup baik. Akan tetapi terungkap melalui dokumen bahwa hasil penelitian ini lebih didominasi oleh fakultas MIPA. Bahkan ada jurusan yang belum berhasil dalam penelitian hibah bersaing pada waktu itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa kekurangan mereka sehingga tidak berhasil dalam kompetisi tersebut. Hasil temuan terindikasi bahwa budaya meneliti tersebut bagi dosen masih kurang dan keterlambatan pihak fakultas memberitahukan informasi terkait adanya penelitian. Hal inilah yang membuat dosen terlambat memasukkan berkas penelitian ke lemlit. Ironisnya, dosen melakukan penelitian jika akan mengurus kenaikan pangkatnya saja.

Apa yang telah diuraikan di atas terhadap hasil temuan mulai dari konteks sampai dengan produk,

semuanya dapat diperbaiki menjadi lebih baik. Hal ini karena peningkatan penjaminan mutu akademik membutuhkan komitmen yang tinggi bagi semua *civitas academica* UNG.



DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. *Evaluasi Program Pendidikan*, PT Bumi Aksara, 2009

Bardach, Eugene, *A Practical Guide for Policy Analysis TheEighfold Path to More Effective Problem Solving*, New York; Seven Bridges Press, 2000

Chazali H. Situmorang. *Kebijakan Nasional tentang Mutu Pekerja Sosial*. 2010

Daniel L. Sufflebeam, Anthony J. Shinkfield, *Systematic Evaluation, a Self-International Guide to Theory and Practice*, Kluwer-Nijhoff Publishing, Michigan, USA, 1986

Daryanto, *Evaluasi Pendidikan Jakarta: Rineka Cipta*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007

Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2003

Dirjen Dikti, *Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, 2003

Djaali, Puji Mulyono dan Ramly. *Pengukuran Dalam Pendidikan*. Jakarta:PPs UNJ, 2000

Duke, D.L & Canady, F.L. *School Policy*. McGraw-Hill, Inc. 1991

Dunn, W. N, *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2000

Dunn, W.N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (PenyuntingMuhadjir). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2000

First, P.F, *Educational Policy for School Administrators*. Boston: Allyn and Bacon, Inc. 1992

Gay, *Educational Evaluation and Measurement, Competencies for analysis and Application*. (Columbus Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company, A Bell and Howell Company, 1979),psytg. 9

H.J.X, Fernandes. *Evaluation of Educational Program*. Jakarta: National Educational Planning and Curriculum, 1984

James R. Sanders, et.all. *The Program Evaluation Standards*.2 edition. California: Sage Publication Inc., 1994

Kalobs di dalam Syahrizal Abas. *Manajemen Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005

Robbins, S.P, *Essentials of Organizational Behavior Englewood Cliffs*. New Jersey; prentice-Hall, Inc. 1989

Sallis, Edward, *Total Quality Management*. London: Phyladelphy, 1993

Stoner, A. James dan Edward Freeman, *Management*, New Jersey: Prentice Hall, International Edition, 1989

Stufflebeam, D.L. *Educational Evaluation and Decision Making*. Itaca Illinois: FE.Peacock, 1971

Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008

Suharto Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta Bandung 2006

Ton Vroeijenstjin, "How Do We Know That We Are Good? (and how do others know it): The need for internal Quality Assurance, *Workshop*, ASAN-EU University Network Programme, Indonesia, 2005

Tyler di dalam Farida Yusuf Tayibnapis. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51.

Weimer, L. David & Vining R. Aidan, *Policy Analysis Concepts and Practice*, Prentice Hall New Jersey, 1991

Williams, Walter, *Social Policy Research and Analysis: The Experience in the Federal Social Agencies*, New York: American Elsevier Publishing, 1971

Yusuf Farida, *Evaluasi Program*, Rineka Cipta Jakarta, 2000